

BAB 6

KEPENTINGAN DALAM GERAKAN MAHASISWA MASA B.J. HABIBIE DAN ABDURRAHMAN WAHID

Bab 6 ini membahas kepentingan politik dan ideologi gerakan mahasiswa dan elit politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bab ini menganalisis kepentingan dan ideologi aktivis mahasiswa dalam gerakan mahasiswa pada masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bab ini juga membahas kepentingan politik dan ideologi gerakan mahasiswa mempengaruhi polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Selain itu, bab ini juga membahas persamaan dan perbedaan kepentingan dan ideologi mempengaruhi sikap dan pandangan gerakan mahasiswa dan elit politik terhadap pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

6.1. Kepentingan Politik dan Ideologi Gerakan Mahasiswa

Secara nasional gerakan massa umumnya didominasi oleh gerakan mahasiswa baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dalam konteks isu, misalnya, isu gerakan mahasiswa lebih bersifat *general* (kepentingan umum) dibanding isu yang diusung oleh gerakan massa lainnya. Misalnya gerakan buruh yang lebih bersifat khusus memperjuangkan kepentingan kaum buru. Secara kuantitatif juga demikian, frekuensi dan jumlah massa gerakan mahasiswa lebih tinggi dan lebih banyak dibanding gerakan ormas lainnya.

Namun dalam konteks sifat gerakannya, gerakan mahasiswa dan gerakan ormas lainnya cenderung sama. Baik gerakan mahasiswa maupun gerakan ormas lainnya, seperti ormas buruh, ormas petani, ormas agama dan ormas-ormas lainnya ada yang (1) bersifat moderat, dan ada pula yang (2) bersifat radikal.¹ Mengenai gerakan mahasiswa yang bersifat radikal sudah tampak pada masa Orde Baru, seperti gerakan mahasiswa Angkatan 74 dalam kasus Malapetaka Januari

¹ Istilah radikal digunakan untuk menunjuk gerakan mahasiswa kritis yang cenderung menggunakan kekerasan (anarkisme) dan istilah moderat untuk menunjuk gerakan mahasiswa kritis yang cenderung antikekerasan (antianarkisme).

(Malari) 1974.² Sedangkan gerakan mahasiswa menjelang kejatuhan Presiden Soeharto tampak terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) kelompok moderat yang cenderung netral atau mendukung Soeharto; (2) kelompok yang radikal yang cenderung anti Soeharto. Kedua kelompok ini terus-menerus mengalami proses kristalisasi hingga memasuki masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Proses pembelahan dan penyatuan terus berlangsung di masing-masing kelompok berdasarkan kecenderungan sifat gerakannya. Di Jakarta ada tiga kelompok besar gerakan mahasiswa, yaitu: (1) Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) yang dapat dimasukkan ke dalam gerakan yang bersifat moderat; (2) Forum Kota (FORKOT) yang dapat dimasukkan ke dalam gerakan yang cenderung bersifat radikal.³ FORKOT merupakan front para aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta yang cenderung bersifat radikal; (3) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang dapat dimasukkan ke dalam gerakan mahasiswa yang cenderung bersifat moderat. KAMMI yang merupakan representasi kekuatan mahasiswa Islam merupakan gerakan mahasiswa yang aksi-aksinya bersifat damai.

Di penghujung pemerintahan B.J. Habibie, para aktivis mahasiswa belum menemukan *platform* bersama, sehingga belum tampak adanya penyatuan dalam kelompok gerakan mahasiswa. Kelompok FKSMJ dan KAMMI, misalnya, pada mulanya hanya mengusung isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sedangkan FORKOT hanya lebih berbicara pada perubahan sistem politik. FKSMJ dan KAMMI kurang banyak berbicara mengenai strategi politik, karena

² Tentang gerakan mahasiswa Angkatan 1974 lihat Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta: LP3ES, 1989.

³ FORKOT dibentuk ketika unjuk rasa menentang Presiden Soeharto masih dianggap "barang mewah" oleh para demonstran. FORKOT dibentuk oleh para demonstran anti Soeharto pada tanggal 11 Maret 1998 di Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah terbentuk, aktivis FORKOT mendatangi kampus-kampus yang tidak berani melakukan demonstrasi penentang Soeharto, seperti Kampus Universitas Sahid, Borobudur, Kertanegara, Akademi Bahasa Asing (ABA-ABI). Istilah "arisan demo" erat kaitannya dengan kedatangan FORKOT ke kampus-kampus kecil untuk memberi kekuatan moral kepada para aktivis mahasiswa demonstran. Universitas Sahid, Borobudur, Kertanegara, Akademi Bahasa Asing (ABA-ABI), misalnya, tadinya tidak memiliki aktivis yang berani akhirnya juga bersuara menentang pemerintahan Soeharto. Bahkan di kampus Universitas Sahid, Jakarta, FORKOT memiliki ruangan sendiri, lengkap dengan telepon dan faksimile. Agenda utama FORKOT waktu itu, turunkan harga dan reformasi total. Pada 2 Mei 1998, mereka sudah berani unjuk rasa untuk menurunkan Soeharto dari kursi Presiden.

kedua kelompok ini tidak menyetujui ‘gerakan politik’ dan atau hanya memilih strategi gerakan mahasiswa dengan *statement moral force*. Belum adanya penyatuan dalam kelompok gerakan mahasiswa, Syafieq, Aktivis FORKOT dan FAMRED mengatakan:

“Sebenarnya kalau dibilang begitu Soeharto jatuh ada 3 kelompok menurut secara politik, pertama memang kelompok yang menginginkan reformasi total, reformasi total disini sebenarnya menginginkan semua anasir Orde Baru itu harus henggang dari kekuasaan karena hanya dengan itulah reformasi dengan tanda kutip dimungkinkan. Ya teman-teman beberapa menggunakan istilah revolusi, benar-benar ada perombakan total terhadap struktur kekuasaan. Dalam kelompok ini misalnya FORKOT itu ada di kelompok ini, dan saya kira beberapa kelompok lain saya tidak tahu persis yang jelas FORKOT ada di kelompok ini. Yang kedua kelompok yang menginginkan reformasi seperti dia menerima Habibie sebagai rezim transisi, di sini mungkin ada tokoh-tokoh saya kira orang seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais ada di posisi itu.”⁴

Namun menjelang SI MPR, para aktivis mahasiswa telah menemukan sebuah *platform* bersama, yaitu: menolak Sidang Istimewa, menolak militerisme dan menuntut pengadilan Soeharto.⁵ Meskipun para mahasiswa merasa tidak sedang melakukan gerakan politik atau hanya merasa melakukan gerakan moral saja, akan tetapi hampir seluruh kelompok gerakan mahasiswa selalu mengajukan tuntutan politik. Ada kelompok mahasiswa yang tidak menolak SI MPR namun tetap menekan agar SI MPR tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang demokratis, dan ada pula kelompok mahasiswa yang menolak SI MPR. Namun kelompok yang terakhir ini merupakan kelompok mayoritas di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, dan kota-kota lainnya.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang memiliki *platform* politik yang berbeda itu akhirnya dapat bersatu. Di Jakarta, misalnya, pada tanggal 28 Oktober, FKSMJ, FORKOT, KOMRAD, FORBES, FAMRED bersatu dalam koalisi yang disebutnya sebagai Aksi Rakyat Bersatu (AKRAB). Bahkan AKRAB kemudian bergabung dengan kelompok buruh seperti Komite Buruh untuk Aksi Reformasi (KOBAR) dan Komite Pendukung Megawati (KPM). Persatuan itu dilatari oleh kesadaran kuatnya rezim yang

⁴ Wawancara dengan Syafieq, Mahasiswa STF Driyarkara, Aktivis FORKOT dan FAMRED, Selasa, 12 Januari 2010 di Jakarta.

⁵ Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Solo: Era Intermedia, 2003, hal.156-157.

dihadapinya dan kesadaran atas perpecahan gerakan yang hanya merugikan. Dorongan untuk berkoalisi juga merupakan reaksi atas upaya provokasi dan propaganda rezim yang melihat aliansi mahasiswa dengan rakyat hanya mengakibatkan kekacauan, seperti kasus konflik internal FORKOT yang menyebabkan sebagian anggotanya keluar dari FORKOT dan mendirikan organ gerakan mahasiswa lain. Hal ini dijelaskan oleh Abdullah, Aktivist FORKOT yang mengatakan:

“Kami ingin mengidentifikasi sebagai generasi yang berbeda dengan kekuasaan Orde Baru. Representasinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai anti kekerasan. Jadi prinsip gerakan kita adalah prinsip *Active Non Violence*, aktif tanpa kekerasan. Tetapi kemudian ada teman-teman yang mulai susah dikendalikan, untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan, sebagai contoh ada aksi yang menggunakan *molotov*, nah ini yang kemudian yang kita persoalkan. Terjadi perdebatan, antara Syafieq dengan teman-teman dari UKI yang di pimpin Adian Napitupulu, namun Adian tidak bisa menjelaskan, Adian berdalih, sebagai minoritas mereka terancam. Ada rasa ketakutan-ketakutan ketika kami harus berhadapan dengan Pam Swakarsa, dengan massa Islam seperti yang kita katakan tadi kan. Jadi kami hidup dalam situasi teror. Tapi Adian menafikkan itu. Awalnya kami memang mencoba mempertahankan prinsip gerakan anti kekerasan, namun tetap gak bisa, akhirnya pecah. Kemudian kami melakukan *voting* dan terbelahlah FORKOT. Ada sekitar 13 kampus yang ingin menuntut bubarnya FORKOT. Ada yang *abstain*, seperti perwakilan dari Universitas Kertanegara, ada yang tetap bergabung tetapi beberapa bulan kemudian mereka (FORKOT) terpecah lagi dan terbentuklah Front Jakarta, FRONT KOTA dan sebagainya.”⁶

Meskipun demikian koalisi itu tidak selamanya terlihat solid. Hal itu dapat dilihat dari perpecahan di tubuh AKRAB yang disebabkan oleh persoalan yang tidak prinsipil. Kecuali FKSMJ, anggota koalisi lainnya seperti FORKOT yang merupakan bagian dari AKRAB masing-masing melakukan aksi sendiri-sendiri walaupun dengan tuntutan dan strategi yang tetap sama, yaitu: (1) menolak Sidang Istimewa MPR; (2) menolak Dwi Fungsi ABRI; (3) menuntut pengadilan Soeharto; (4) menuntut pembentukan ‘Pemerintahan Sementara’. Berbeda dengan aksi-aksi FORKOT yang normatif, FKSMJ yang masih sebagai anggota AKRAB justru melakukan aksi praktis seperti melakukan *camping* menuju kediaman Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid. FKSMJ bahkan mendesak

⁶ Wawancara dengan Abdullah, Aktivist FORKOT dan FAMRED, Penentang B.J. Habibie. Sabtu, 30 Mei 2010.

sejumlah elit politik oposisi, seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Sultan Hamengku Buwono X untuk segera membentuk Presidium yang merupakan wujud dari tuntutan pembentukan Pemerintahan Sementara. Presidium itulah yang nantinya menurut FKSMJ menyelenggarakan pemilihan umum.⁷

Di daerah-daerah, proses kristalisasi tuntutan gerakan mahasiswa terus berlangsung. Kelompok-kelompok gerakan mahasiswa Islam pendukung demokrasi terus melakukan aksi-aksi aliansi dengan kelompok-kelompok agama lainnya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) bahkan melihat perjuangan membebaskan para Tahanan Politik (Tapol) Islam dan advokasi terhadap teror para Kyai di Jawa Timur dan tempat lain sebagai salah satu program prioritas.⁸ PRD melihat bahwa kekuatan Islam merupakan kekuatan demokratisasi yang sangat penting, sehingga aliansi semua kekuatan pendukung demokrasi dengan kekuatan Islam merupakan kunci dari kemenangan demokrasi. PRD juga melihat bahwa kekuatan Islam demokrat mampu memblokade kekuatan ultra-kanan yang dapat memanipulasi Islam dalam melakukan aksi teror politik bersama militer dan para kriminal terorganisir.

Isu gerakan politik menentang B.J. Habibie muncul menyeret nama FORKOT di dalamnya. Bahkan Letnan Jenderal (Purn.) Ahmad Tirtosudiro, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), menuding FORKOT sebagai salah satu kelompok yang merencanakan makar terhadap Presiden B.J. Habibie. Sementara FORKOT melihat turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan selama 32 tahun bukanlah akhir dari segalanya. Dalam pandangan organisasi mahasiswa yang tergabung di dalam AKRAB seperti FORKOT, tuntutan B.J. Habibie mundur dari jabatannya hanyalah salah satu penekanan dari reformasi total. Reformasi total yang diinginkan oleh FORKOT adalah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat termasuk kekuasaan yang dipegang oleh B.J. Habibie yang juga dinilai tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi

⁷ Sikap Megawati, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Sultan Hamengku Buwono X yang menolak usul pembentukan Presidium membuat FKSMJ kecewa.

⁸ Front Sabilillah dan lembaga-lembaga HAM menyebut jumlah Tapol Islam yang paling banyak dan paling sedikit diadvokasi. Aktivis yang diculik, disiksa, disekap dan dibunuh oleh militer juga banyak aktivis Islam, seperti aktivis Negara Islam Indonesia (NII), Aktivis Aceh, aktivis Lampung dan Tanjung Priok.

dan krisis politik. Tentang tudingannya adanya gerakan mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan elit politik, Eli Salomo, Aktivistis FORKOT dan FRONT KOTA hanya membantah organisasinya ditunggangi namun tetap membenarkan adanya gerakan mahasiswa ditunggangi oleh elit politik, seperti KAMMI. Eli Salomo mengatakan:

”Sejak kita menggulirkan soal KRI, kita sebenarnya banyak *sounding* dengan banyak tokoh. Banyak tokoh yang kita *sounding*, kita *sounding* bukan dalam pengertian kita melakukan jual-beli politik tapi kita mempresentasikan imajinasi kita tentang Indonesia masa depan itu seperti apa dan mengapa kita meminta mereka untuk menjadi bagian dari mencapai Indonesia masa depan itu atau saat itu yang kita sebut Indonesia baru. Jadi komunikasi politik dengan elit-elit politik tersebut itu terjadi, tetapi apakah itu kemudian terjadi transaksi politik? Kan bisa di cek di lapangan apakah kita memunculkan satu nama, dua nama, atau tiga nama? Misalnya peristiwa Semanggi memang itu menjadi suatu peristiwa yang cukup besar dan kalau kita lihat begini premisnya kalau kita bicara tentang mahasiswa maka kita bicara tentang sekelompok anak muda yang punya intelektual, yang punya gagasan dan intelektual, dan dia adalah orang yang bisa menganalisis. Apakah sebodoh itu mereka tidak mampu menganalisis bahwa sekelompok elit pimpinan FORKOT melakukan *deal* politik dukungan politik kepada elit tertentu. Karena salah satu yang menjadi dorongan adalah kita tidak mau ditunggangin oleh elit politik tertentu di situ poinnya, dan di situ juga yang menjadi kritik kita terhadap KAMMI.”⁹

Sebagai upaya menentang B.J. Habibie, FORKOT mengusulkan pembentukan Komite Rakyat Indonesia (KRI). Fungsi KRI adalah menyusun agenda pemerintahan untuk mengakhiri pemerintahan B.J. Habibie. Menurut FORKOT mengikuti agenda pemerintahan B.J. Habibie sama saja dengan mengakui pemerintahannya. Oleh karena itu semua kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie dianggap tidak sah sebelum KRI dibentuk. FORKOT menentang pelaksanaan SI MPR, karena SI MPR dapat menjadi sumber legitimasi bagi pemerintahan B.J. Habibie. Sementara tujuan SI MPR oleh para elit politik adalah untuk mempercepat pemilu dalam mengakhiri kekuasaan B.J. Habibie. Hal itu diakui oleh Akbar Tanjung dengan mengatakan:

“Untuk bisa dipercepat pemilu maka harus dirubah keputusan MPR yang menyatakan pemilu yang berikutnya di 2002, maka diadakanlah Sidang Istimewa untuk merubah itu. Jadi tujuan utama Sidang Istimewa itu adalah

⁹ Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivistis FORKOT dan Front Kota, pada tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

untuk merubah ketetapan MPR tentang pemilu yang seharusnya diadakan tahun 2002.”¹⁰

Mencermati isu gerakan mahasiswa, pemerintahan B.J. Habibie melalui Menteri Dalam Negeri lalu menyatakan bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi murni sebagai gerakan moral dan sudah mengandung kepentingan politik. Penilaian itu terkait dengan ditemukannya dokumen berupa satu bundel agenda program untuk menjatuhkan pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintah B.J. Habibie mensinyalir adanya kelompok penentang pemerintah yang membonceng, memanfaatkan dan menunggangi aksi-aksi gerakan mahasiswa. Namun aktivis mahasiswa tidak hanya menolak tuduhan itu, tetapi juga balik menyerang dengan menegaskan bahwa pemerintahan B.J. Habibie yang sudah berumur 100 hari tidak mampu menangani krisis politik dan ekonomi yang ditandai oleh mahalnnya harga bahan pokok yang jauh melebihi harga bahan pokok sebelum kejatuhan Presiden Soeharto.

Penolakan mahasiswa terhadap pemerintahan B.J. Habibie bukan saja dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan akan kemampuan B.J. Habibie mengatasi krisis politik dan ekonomi yang tidak kunjung membaik, tetapi juga karena B.J. Habibie dianggap masih merupakan bagian dari rezim Soeharto. Mahasiswa tetap tidak mengakui sejumlah kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie sebagai prestasi B.J. Habibie, sekalipun hal itu telah dirasakan berdampak positif terhadap proses demokrasi dan demokratisasi.

Dalam pandangan mahasiswa, indikator dari berlangsungnya proses demokrasi dan demokratisasi seperti sistem multi partai yang sudah tampak sehat, *civil society* yang tumbuh subur, kebebasan pers yang sangat melegakan bukanlah murni dari kebijakan politik dan kebaikan B.J. Habibie. Mahasiswa penentang B.J. Habibie tetap beranggapan bahwa indikator dari berlangsungnya proses demokrasi dan demokratisasi seperti itu merupakan kewajaran dari proses transisi dan konsolidasi demokrasi dimana pemimpin pengganti secara terpaksa akan melakukan liberalisasi politik untuk mencegah kekuasaanya tidak dilucuti oleh kekuatan-kekuatan pendukung demokrasi dan pendukung reformasi.

¹⁰ Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

Sikap B.J. Habibie yang tidak memperlihatkan sedikitpun keinginan politik untuk mengadili Soeharto sebagaimana yang menjadi tuntutan para aktivis mahasiswa bukan saja memperkuat tuduhan para aktivis mahasiswa bahwa B.J. Habibie adalah anak kandung dari rezim Orde Baru yang sakit. Namun juga memperkuat dugaan mahasiswa bahwa B.J. Habibie kurang tanggap terhadap aspirasi politik rakyat yang menghendaki percepatan reformasi total. Oleh karena itu gagasan yang ditawarkan oleh aktivis mahasiswa penentang B.J. Habibie berupa ‘Pemerintahan Transisi’ (PT) atau ‘Komite Rakyat Indonesia’ (KRI) dapat dilihat sebagai jawaban atas tuntutan mereka tentang sebuah pemerintahan yang dapat mewujudkan cita-cita reformasi total.

Pemerintahan Transisi (PT) atau Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang dituntut oleh para aktivis mahasiswa memiliki dua fungsi, yaitu: (1) fungsi eksekutif, dan; (2) fungsi legislatif. Namun Pemerintahan Transisi (PT) atau Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang dimaksud itu bukanlah pemerintahan definitif. Melainkan sebuah bentuk ‘pemerintahan yang bersifat sementara’ yang akan mengakhiri masa krisis politik melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas, terbuka, jujur, adil dan kompetitif tanpa keikutsertaan Golkar. Melalui pemilu yang demokratis, Pemerintahan Transisi (PT) atau Komite Rakyat Indonesia (KRI) yang terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas, serta basis legitimasi politik yang kuat rezim Orde Baru akan berakhir. Oleh karena itu Pemerintahan Transisi (PT) atau Komite Rakyat Indonesia (KRI) bagi para penentang B.J. Habibie dipandang sebagai bentuk persiapan pemerintahan yang bersih (*clean government for cleansing regime*).

Sebagai upaya untuk membentuk Pemerintahan Transisi (PT) atau Komite Rakyat Indonesia (KRI), para aktivis mahasiswa penentang B.J. Habibie kemudian melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Para aktivis mahasiswa mempertajam gagasan dan langkah-langkah strategisnya dalam Rembug Nasional Mahasiswa Indonesia I (RNMI I) yang berlangsung pada akhir Februari 1999 di Universitas Udayana Denpasar Bali. Diikuti ribuan mahasiswa garis keras, 126 organisasi gerakan mahasiswa dari 23 provinsi, RNMI I berhasil merumuskan empat kesepakatan pokok, yaitu: (1) memberi kewenangan bagi rakyat Papua dan Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri; (2) membentuk Pemerintahan Transisi

(PT) sebagai solusi atas ketidakpercayaan terhadap pemerintahan B.J. Habibie; (2) menolak Pemilu 1999; (3) mencabut Dwi Fungsi ABRI.¹¹

Berbeda dengan sikap elit politik yang hanya sekedar ingin memberhentikan Presiden B.J. Habibie lalu menggantinya sesuai usulannya melalui percepatan Pemilu pada tahun 1999, para aktivis mahasiswa penentang Presiden B.J. Habibie justru menawarkan Pemerintahan Transisi. Para aktivis mahasiswa menawarkan Pemerintahan Transisi, karena melihat Pemilu 1999 bukanlah jawaban tepat atas berbagai krisis yang tengah berlangsung. Para aktivis mahasiswa penentang B.J. Habibie tetap pada pendiriannya bahwa enam agenda reformasi, yaitu: (1) turunkan dan Adili Soeharto; (2) bubarkan Golkar; (3) cabut Dwi Fungsi ABRI; (4) tolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (5) penegakkan supremasi hukum; (6) pengusutan pelanggaran HAM semuanya lebih mendesak dibanding sekedar menyelenggarakan Pemilu yang hanya memberi jalan bagi kembalinya kekuasaan otoritarianisme lama. Tentang adanya elit politik yang menolak Presiden B.J. Habibie melalui percepatan pemilu, Akbar Tanjung mengatakan:

“Ya memang gerakan-gerakan penentangan terhadap Orde Baru kan begitu kuat dan perwujudan dalam tekanan-tekanan terhadap Orde Baru antara lain tentu tekanan terhadap Pak Habibie. Selain itu juga tekanan terhadap Golkar juga kan, tekanan-tekanan kepada Pak Habibie yang begitu kuat dari para eksponen-eksponen reformasi, tokoh-tokoh reformasi yang termasuk para senior-senior pemerintahan sebelumnya termasuk Amien Rais, Emil Salim, terus ada Pak Subroto, banyak tokoh-tokoh yang menghendaki ada perubahan dan memang tokoh-tokoh ini kelihatannya tidak suka kepada Pak Habibie, Kemal Idris termasuk, karena memang ini secara pribadi kelihatan mereka tidak begitu suka kepada Pak Habibie. Bahwa mereka juga sebetulnya bagian dari kepemimpinan Soeharto juga, tapi memang mereka tidak suka ada momentum perubahan termasuklah mereka juga menentang untuk Pak Habibie terus berkuasa karena kalau dilihat dari konstitusi masa jabatan Presiden itukan 5 tahun dari 1998-2003. Tapi karena mereka tidak mau Pak Habibie menjadi Presiden dan kemudian juga kekuatan-kekuatan yang anti kepada Orde Baru tidak menghendaki kepemimpinan yang lama dan menghendaki ada kepemimpinan yang baru mereka memberikan tekanan-tekanan politik supaya dilakukan pemilihan umum, nah, itulah yang

¹¹ RNMI I yang berlangsung pada akhir Pebruari 1999 di Universitas Udayana Denpasar Bali merupakan konsolidasi terbesar mahasiswa pasca jatuhnya Soeharto. Setelah pertemuan di Bali, tingkat komunikasi, jaringan dan konsolidasi mahasiswa Indonesia semakin tinggi. Secara tidak langsung RNMI I ini menjadi cikal-bakal dari lahirnya organisasi-organisasi gerakan mahasiswa tingkat nasional.

akhirnya menghasilkan kompromi antara Presiden dengan pimpinan DPR untuk menyetujui percepatan pemilu.”¹²

Para aktivis mahasiswa penentang Presiden B.J. Habibie secara terus menerus melakukan konsolidasi di tengah kompetisi elit politik menjelang Pemilu 1999. Mahasiswa tetap tidak memperdulikan tawaran, iming-iming dan tekanan dari elit politik yang memintanya meninggalkan gerakan ekstra parlementer. Bahkan setelah RNMI I di Denpasar berhasil menyatukan mereka, RNMI II selanjutnya diselenggarakan di Surabaya pada bulan Mei 1999. Berikutnya, pasca RNMI II di Surabaya, aksi-aksi mahasiswa menentang Presiden B.J. Habibie semakin gencar dilakukan diberbagai kota dengan agenda isu pemerintahan transisi. Sebagai upaya untuk memperkuat aksi-aksinya, para aktivis mahasiswa yang terlibat dalam RNMI lalu membuat organisasi semi permanen tingkat nasional yang diberi nama Jaringan Nasional Mahasiswa Indonesia (JNMI).¹³

Kemunculan JNMI di depan publik ditandai oleh penolakannya terhadap keputusan Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998 yang menetapkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999 yang juga menyertakan Golkar. Bagi para aktivis mahasiswa penentang B.J. Habibie, meskipun Pemilu 1999 telah menyertakan 48 partai politik tapi keiksertaan Golkar sebagai *the rulling party* pada saat Orde Baru tetap tidak bisa dimaafkan begitu saja. Para aktivis mahasiswa tetap menuntut agar Golkar didiskualifikasi, karena dinilainya telah membuat sengsara rakyat Indonesia selama 32 tahun. Tentang resistensi para aktivis mahasiswa terhadap Partai Golkar, Akbar Tanjung mengakuinya dengan mengatakan:

“Pada waktu itu saya tidak aktif di dalam melakukan komunikasi dengan mahasiswa, karena pada waktu itu Golkar sendiri sedang mengalami masalah dengan para mahasiswa atau dengan para orang-orang muda karena tekanan-tekanan pada Golkar pada waktu itu masih kuat di kalangan orang-orang muda, karena dianggap Golkar bagian dari Orde Baru. Jadi saya tidak begitu banyak berkomunikasi dengan mahasiswa.”¹⁴

Ada empat isu sentral yang menjadi perhatian kalangan aktivis GKOB dan GPOB, yaitu: (1) pembentukan pemerintahan transisi; (2) pencabutan Dwi Fungsi

¹² Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

¹³ Jaringan Nasional Mahasiswa Indonesia (JNMI) yang dibentuk merupakan organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk menaungi organisasi gerakan mahasiswa.

¹⁴ Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

ABRI; (3) pembubaran lembaga ekstra *judicial*; (3) pembebasan Tapol/Napol; (4) perbaikan kondisi ekonomi; (5) otonomi daerah; (6) pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (7) pengusutan pejabat yang terlibat KKN.¹⁵

Dalam tataran isu politik, terdapat perbedaan yang tajam di antara kelompok gerakan pasca-Soeharto. FKSMJ, misalnya, mendukung pelaksanaan SI MPR dengan sejumlah persyaratan. Sebaliknya, FORKOT, FAMRED, dan kelompok-kelompok GKO di luar Jawa, seperti KMPPRL di Lampung semuanya dengan tegas menolak SI MPR. Penolakan dilakukan atas dasar penilaian bahwa pemerintahan B.J. Habibie tidak memiliki legitimasi dalam menyelenggarakan SI MPR. GPOB menilai *mainstream* tuntutan GKO dan penolakannya terhadap SI MPR tidak strategis. Penilaian GPOB diperkuat oleh aktivis mahasiswa luar daerah yang melihat tidak *urgent* menolak SI MPR karena potensial menyulut konflik.¹⁶ Akbar Tanjung mengatakan:

“Kalau percepatan pemilu itu sebetulnya karena tuntutan yang kuat dari elemen-elemen demokrasi elemen-elemen pendukung reformasi untuk mendapatkan pemerintahan baru yang lebih legitimate karena apa karena pemerintahan Pak Habibie tidak dianggap tidak legitimate. Pak Habibie itu dianggap tidak legitimate sebagai Presiden karena dia adalah orang yang direkrut Soeharto menjadi Wapres sehingga bayang-bayang Soeharto masih sangat kuat terhadap Pak Habibie karena itu diuntut untuk dilakukan adanya pemilihan umum untuk mendapatkan kepemimpinan bangsa yang baru. Perlu diketahui bahwa hasil MPR pada tahun 1997-1998 menyebutkan pemilu yang akan datang dilakukan 5 tahun setelah pemilu 1997 berarti tahun 2002. Pemilu berikutnya ada tahun 2002 tapi karena ada tekanan yang sangat kuat dari kekuatan-kekuatan reformasi untuk mendapatkan kepemimpinan yang baru yang legitimate dan untuk mendapatkan kepemimpinan yang legitimate hanya mungkin melalui pemilu karena pemilu di tetapkan tahun 2002 sedangkan tuntutannya 1998 begitu kuat maka diadakanlah Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998 untuk terutama untuk mempercepat pemilu karena sebelumnya pemilu diputuskan oleh MPR tahun 2002. Untuk merubah agar pemilu dipercepat oleh MPR, karena itu MPR bersidang pada bulan oktober 1998 untuk mempercepat pemilu. Awalnya ada kesepakatan antara Presiden dengan pimpinan Dewan sepakat, karena apa, karena tekanan-tekanan masyarakat, tekanan-tekanan masyarakat yang begitu kuat mengakibatkan tercapailah kesepakatan antara Presiden dengan pimpinan Dewan untuk mempercepat pemilu. Dalam rangka untuk mempercepat pemilu maka disepakatilah untuk diadakan Sidang Istimewa MPR pada bulan oktober 1998. Jadi sebetulnya awalnya

¹⁵ Lihat Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, “*Reformasi Atau Mati!*”: *Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto*”, dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*,hal.212.

¹⁶ Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*,hal.212.

Sidang Istimewa MPR itu dalam rangka untuk mempercepat pemilu untuk melakukan perubahan terhadap keputusan MPR. Tapi laporan pertanggung jawaban itu? Itu 1999 ini Sidang Istimewa 1998, tapi Sidang Istimewa 1998 itu untuk merespon tuntutan agar diadakan pemilu dalam rangka memilih kepemimpinan nasional baru yang lebih legitimate karena dianggap Pak Habibie tidak legitimate karena Pak Habibie bagian dari Soeharto.”¹⁷

Perbedaan itulah yang membuat gerakan mahasiswa, seperti GKOB dan GPOB mencari isu-isu politik yang dianggapnya masih tergolong baru, seperti isu percepatan “pembusukan” rezim. Mereka memandang isu percepatan “pembusukan” rezim cukup signifikan untuk didesakkan. Meskipun demikian persoalan warisan Orde Baru seperti masalah Tapol/Napol dan Dwi Fungsi ABRI tetap disuarakan. Di Yogyakarta, juga terjadi kesepakatan untuk mengajukan isu penentang militerisme yang diikuti pembentukan komite antara beberapa organ, antara lain PRD, KAMMI, dan LMMY. Melalui kesepakatan itu perbedaan dapat diminimalkan sampai batas tertentu. Di Lampung, KMPPRL menyuarakan isu politik pembebasan Tapol/Napol Islam seperti Tapol/Napol Tanjung Priok dan GPK Warsidi, serta isu pengusutan kasus pelanggaran HAM di Aceh seraya menjajaki kemungkinan aliansi dengan KAMMI yang juga memperjuangkan pembebasan Tapol/Napol Islam.¹⁸ Meskipun demikian KAMMI dan HAMMAS tetap mendukung B.J. Habibie seperti diakui oleh Eli Salomo, Aktivistis FORKOT dan FRONT KOTA dengan mengatakan:

”Pada sisi ini, sebenarnya KAMMI mencoba tampil dengan elegan, tampil dengan nuansa yang intelektual dan sebagainya meskipun garis mereka tetap pada garis yang mempertahankan Habibie. Tapi muncul juga kelompok-kelompok mahasiswa lain yang lebih bergaris keras untuk mempertahankan Habibie, misalnya HAMAS yang berulang kali mencoba menyerang FORKOT dengan labeling komunis. Meskipun berapa kali kita bertemu dalam satu forum seminar dengan pimpinan-pimpinan HAMAS, mereka juga tidak bisa membuktikan dimana tuduhan mereka terhadap FORKOT yang mereka tuduh sebagai komunis atau komunis gaya baru.”¹⁹

Dari pernyataan Eli Salomo tersebut setidaknya dapat ditegaskan bahwa persoalan ideologi dalam gerakan mahasiswa bukan hanya kerap menjadi dasar konflik, tetapi juga sering menjadi hambatan dalam penyatuan gerakan

¹⁷ Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

¹⁸ Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.213.

¹⁹ Wawancara Eli Salomo, Aktivistis FORKOT dan Front Kota, tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

menghadapi rezim pemerintah. Tudingan FORKOT bahwa KAMMI beraliran garis lunak (moderat) dan HAMAS beraliran garis keras, serta sebaliknya tudingan HAMAS bahwa FORKOT menganut aliran kiri radikal (komunis) membuktikan adanya konflik antar sesama kelompok gerakan mahasiswa.

Selain isu menentang militerisme dan pembebasan Tapol/Napol, aktivis GKOB tetap mengajukan tuntutan pembentukan Pemerintahan Transisi. Dialog Nasional yang diikuti oleh aktivis mahasiswa se-Jawa, Bali dan Sumatera secara garis besar sepakat dalam hal, yaitu: (1) format Pemerintahan Transisi yang sesuai adalah merupakan proyeksi dari kondisi obyektif dan subyektif yang dihadapi oleh mahasiswa; (2) diperlukan pengkondisian di masing-masing daerah. Setidaknya ada empat alternatif bentuk Pemerintahan Transisi yang diusulkan dalam Dialog Nasional tersebut format Pemerintahan Transisi yang dianggap sesuai proyeksi dari kondisi obyektif dan subyektif yang dihadapi oleh mahasiswa, yaitu: (1) Dewan Rakyat; (2) Komite Rakyat Indonesia (KRI); (3) Barisan Sipil Nasional; (4) Lembaga Presidium. Di lapangan, sejumlah kelompok-kelompok gerakan mahasiswa berusaha mengoperasionalkan bentuk-bentuk Pemerintahan Transisi. Organ DRMS dan KMPURL, misalnya, sangat aktif mengorganisir lapisan massa rakyat di tiap sektor sebagai mekanisme implementasi konsep Dewan Rakyat. Sebaliknya, aktivis FORKOT yang mengusulkan Komite Rakyat Indonesia dan Barisan Sipil Nasional belum dapat mengoperasionalkan.²⁰

Berbeda dengan kelompok gerakan mahasiswa di Jakarta, gerakan mahasiswa di luar Jakarta lebih memilih memusatkan perhatiannya pada isu-isu lokal ketimbang isu-isu nasional. Sikap itu dipilih untuk menghindari jebakan isu nasional yang elitis dan sarat kepentingan politik tertentu, karena menurutnya reformasi tidak harus berhenti di tingkat pusat. Kelompok gerakan mahasiswa di daerah mulai melihat pentingnya isu-isu lokal disuarakan untuk menuntaskan berbagai persoalan-persoalan di daerah. Oleh karena itu aksi-aksi protes di daerah lebih mengkrystal dalam bentuk tuntutan: (1) pengusutan kasus KKN pejabat

²⁰ Lihat Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.213.

Pemda; (2) revisi UU Pemerintah Daerah; (3) restrukturisasi pemerintah daerah; (4) penataan kembali otonomi daerah.²¹

Tudingan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa di luar Jakarta tentang gerakan mahasiswa yang sarat kepentingan politik diakui oleh Eli Salomo, Aktivist FORKOT dan FRONT KOTA dengan mengatakan:

“Kalau secara jujur mereka (KAMMI) harus mengatakan bahwa mereka tumpangan alat tumpangan dari elit-elit senior-senior mereka maupun dari alat tumpangan dari Habibie untuk bertahan. Hal inilah yang kita tolak dan bahwa kemudian terjadi banyak bantuan-bantuan dari beberapa elit politik kita mengakui misalnya kelompok Jenggala posnya Arifin Panigoro itu sering melakukan bantuan misalnya dalam bentuk roti lah atau makanan. Atau Suara Ibu Peduli (SIP) atau misalnya dari *genk* 234-ITB itu banyak tapi apakah di dalamnya terjadi transaksi? Sekali lagi aku minta bisa di cek dari program politiknya apakah memunculkan 2-3 nama menjadi kita dorong untuk menggantikan Habibie. Kan tidak! Bahwa peristiwa itu kemudian terjadi pertarungan besar mengakibatkan korban dan munculnya korban itu kan bukan dari skenario yang kita mau bahwa itu adalah satu eksekusi dari pemerintahan yang tidak mau berubah, dari satu rezim yang tidak mau berubah, sehingga dia mengerahkan satu kekuatan bersenjata melawan sekelompok orang yang tidak bersenjata sekelompok orang juga tidak terlatih.”²²

6.1.1. Dukungan dan Penolakan atas Dasar Kepentingan Ideologi

Dukungan gerakan mahasiswa dan elit politik terhadap B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid atas dasar ideologi merupakan kenyataan yang sulit diingkari. Eggi Sudjana, elit politik pendukung B.J. Habibie, misalnya, secara terang-terangan mengaku kalau dukungannya terhadap B.J. Habibie atas dasar ideologi Islam. Eggi Sudjana mengatakan:

“Yang pertama perlu di pahami, bahwa Habibie membawa jargon Islam. Itu lebih dikenal Islam secara versi ICMI, yang merupakan penerobos di masa orde baru, berkuasa. Habibie yang bisa buka pintu ke tingkat birokrasi sampai ke elit istana, sampai Soeharto relatif terpengaruh oleh pikiran-pikiran Islam. Sehingga itulah Soeharto di tumbangkan, karna sudah berpihak kepada Islam. Kedua, pendekatan ideologis, saya melihat sebagai ideologis Islam yang bisa yang bisa di wujudkan dalam riil praktis politik yang mana melalui presiden. Dan itu efektif, artinya saya bisa membawa gagasan-gagasan Islam berwujud menjadi hukum positif. Saya mendukung Habibie, dia cara berpikrinya sangat fungsional, intelektualnya sudah

²¹ Lihat Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.213-214.

²² Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivist FORKOT dan Front Kota, tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

terjamin. Saya menentukan pilihan mendukung Habibie, karena ideologis. Yang ideologis ini betul-betul universal, andaikata *in position* orang yang bisa seide dengan itu adalah Megawati, saya akan dukung Megawati, jadi bukan karena Habibiennya.²³

Pengakuan Eggi Sudjana tentang dukungan elit politik atas dasar ideologi terhadap B.J. Habibie tersebut juga diakui oleh Ahmad Sumargono, aktivis KISDI pendukung B.J. Habibie. Ahmad Sumargono mengatakan:

“Saya jelas, saya punya latar belakang ideologi, misalnya kita kalau melihat pemerintahan Habibie pada saat itu, bisa dikatakan mempunyai poin terutama ideologi dalam arti Islam. Kita melihat di dalam pemerintahan Habibie itu, banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam Islam, artinya dia membuat ICMI, kemudian sampai sekarang juga tumbuh, kemudian museum Islam. Kemudian juga tegas, waktu saya ketemu dia mengatakan kita berapa persen disini? Kita 90%, kita punya hak. Dan paradigma dia, proporsional, yah wajar dong kalau kita mayoritas, kita harus memiliki kekuasaan yang lebih besar. Sebetulnya dia berpihak kepada Islam betul, sekalipun dia awam dalam ke-Islaman, itu yang kita dukung. Kemudian dari segi keberkahan, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sampai 6%. Karena itu adalah berkah, Dollar turun. Dari segi kepemihakan secara ideologis, maka Habibie, kita anggap dibanding dengan pemimpin sebelumnya, dia yang paling tepat.”²⁴

Sebaliknya, dukungan HMI terhadap terhadap B.J. Habibie yang oleh HMI sangat sulit dilihat sebagai dukungan atas dasar ideologi tetap memiliki hubungan dengan Islam. HMI menegaskan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam bagian-bagian tertentu tapi dukungan HMI terhadap terhadap B.J. Habibie lebih mudah dilihat dari perspektif politik. Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB HMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, mengatakan:

“Dalam pengertian kesamaan garis ideologi, rasanya tidak ada, karena memang ideologi politik Habibie dengan ideologi yang diajarkan di HMI kan susah untuk dikatakan sama yah, walaupun tentu ada beberapa bagian yang sama. Tapi dalam konteks yang disebut sebagai kepentingan umat Islam, itu lebih mudah terakomodir oleh sosok Habibie pada waktu itu. Dan akomodasi itu juga syaratnya memang tidak ada krisis politik, karena itu yang paling utama adalah menghindari krisis politik.”²⁵

²³ Wawancara dengan Eggi Sudjana, Elit politik pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa, 30 Maret 2010 di Jakarta.

²⁴ Wawancara dengan Dr. Ahmad Sumargono, SE., MM, aktivis Islam/elit politik pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010.

²⁵ Wawancara dengan Anas Urbaningrum Ketua Umum PB HMI pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Selasa tanggal 04 Mei 2010 di Jakarta.

Dukungan kelompok-kelompok ideologis yang berbeda terhadap B.J. Habibie pada hakekatnya merupakan wujud dari konflik ideologi yang selama Soeharto tidak menemukan ruang terjadinya konflik dan konsensus. Pertarungan antara ideologi kanan dan kiri yang oleh Ahmad Sumargono kanan diartikan Islam dan kiri diartikan sebagai kelompok pluralisme yang anti Islam. Ahmad Sumargono mengatakan:

“Jelas, itu ada perbedaan, namanya kiri-kanan, yang kiri jelas, anti terhadap Islam, dia dengan konsep-konsep sekarang, yang dianggap pluralisme, sementara mereka menganggap kita ingin membuat *Islamic State*. Padahal kan, Islam tuh ada aspiratif, ada normatif, ada orang yang mencita-citakan *Islamic State*, tapi yang lebih adalah aspiratif. Bagaimana kita masuk ke dalam kekuasaan itu, tanpa embel-embel apapun, kita bisa memakmurkan bangsa dan Negara ini dengan konsep-konsep Islam, tidak normatif. Kiri ini, mereka juga punya misi sendiri, bagaimana konsep-konsep kebebasan, liberalisasi, itu bisa masuk sehingga kayak sekaranglah yang terjadi, kebebasan yang berlebihan seperti itu.”²⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ideologi yang dianut oleh Ahmad Sumargono merupakan campuran antara kepentingan umat Islam dan pemikiran intelektual Islam yang dipengaruhi ajaran dan tradisi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai argumen, namun juga dimaksudkan sebagai pandangan untuk menolak pandangan kelompok kiri dan liberalisme, program untuk mempertahankan, mengubah ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu yang dianggap beretentangan dengan tradisi dan ajaran Islam. Sebab, ideologi menurut Robert E. Lane bukan hanya merupakan suatu argumen, tetapi juga dimaksudkan sebagai pandangan yang mendorong dan melawan pandangan lain, ideologi juga meliputi program untuk mempertahankan, mengubah ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu. Dukungan Ahmad Sumargono terhadap B.J. Habibie atas dasar ideologi diakui oleh Ahmad Sumargono dengan mengatakan:

“Yah, saya jelas, saya kan punya latar belakang ideologi, kalau dilihat pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu, mempunyai poin terutama ideologi dalam arti Islam yah, kita melihat dalam pemerintahan Habibie itu, banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam Islam, artinya, dia membuat ICMI, museum Islam dan sebagainya. Kemudian dia tegas. Dalam paradigma dia, dia punya konsep proporsional, tidak memandang mayoritas-

²⁶ Wawancara dengan Dr. Ahmad Sumargono, SE., MM, elit politik dan aktivis KISDI pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010.

minoritas, artinya, wajar dong kalau kita mayoritas kita harus memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, itu yang saya ingat tentang konsepnya dia, sehingga kalau kita berbicara waktu itu, sebetulnya dia berpihak kepada Islam betul sekalipun dia awam dalam keIslaman. Nah, itu yang kita dukung kan, kita melihat dari segi keberkahan. Dalam masalah ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam sekian persen, iya kan? Dollar bisa turun, nah itu yang kita dukung. Jadi saya melihat dari segi keberpihakan secara ideologis, maka ini kita anggap sudah tepat, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya, dia yang paling tepat²⁷

Dukungan elit politik atas dasar ideologi terhadap B.J. Habibie tidak disangkal oleh aktivis gerakan mahasiswa. Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI yang mendukung pemerintahan B.J. Habibie mengakui keterlibatan elit politik Islam, seperti Ahmad Sumargono dalam mendukung B.J. Habibie. Fachri Hamzah mengatakan:

“Yang menonjol, yang mendukung Habibie sejak awal, itu sebetulnya kekuatan demonstrasi yang dipimpin oleh Ahmad Sumargono. Di belakang Ahmad Sumargono ini banyak sekali organ-organ Islam, saya tidak mau terjebak dalam politik mobilisasi pada waktu itu. Saya sendiri relatif bilang, tidak bisa kita menganggap Habibie sama dengan Soeharto. Kemudian saya menulis di *Republika*, suatu tulisan yang cukup kontroversial, karena gini, saya ga’ suka dengan mobilisasi yang di belakangnya Tentara. Seperti Pam Swakarsa. Artinya, kalau membela Habibie sebagai intelektual, dan secara konsepsional memang layak dibela. Waktu itu, diantara kesulitan yang paling berat membela Habibie itu dari sisi ekonomi. Jadi saya tidak tertarik untuk ikut dengan cara mobilisasi itu, berkomunikasi iya.²⁸

Sebaliknya, meskipun KAMMI sebagai organisasi mahasiswa ekstra universiter dalam mendukung B.J. Habibie dilakukan atas dasar politik, namun tetap tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan basisnya di mesjid-mesjid kampus dan anggota-anggotanya cenderung berafiliasi ke PKS. Oleh karena itu meskipun KAMMI mengaku ideologi organisasinya adalah Islam, akan tetapi para aktivisnya belum menegaskan Islam sebagai landasan perjuangan politik. Fachri Hamzah mengatakan:

”Kalau ideologi sih, menurut saya agama tidak boleh direduksi menjadi ideologi. Agama yah agama, jadi Islam itu adalah agama, jadi kita bicara ideologi itu sebagai satu konsepsi cita-cita, terjemahannya juga belum ada di kalangan teman-teman mahasiswa. KAMMI itu kan, cikal bakalnya kan

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Sumargono, Elit politik dan aktivis KISDI Pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Kamis, 01 April 2010, di Jakarta.

²⁸ Wawancara dengan Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI yang mendukung pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu tanggal 03 April 2010 di Cibubur.

gerakan kampus, *Tarbiyah*. Jadi waktu itu, *Tarbiyah* itu sebetulnya mimpi tentang masyarakat yang lebih baik, dimana didasarkan pada prinsip yang di Al Quran itu. Pandangannya itu, yang penting baik. Saya ingat waktu itu, kenapa kita cocok dengan reformasi dan membangun kekuatan demokrasi yang bebas yah, karena teorinya kita yakini betul bahwa meskipun kebebasan itu liar, tapi cenderung lebih baik daripada otoritarianisme. Memang terbukti kemudian secara bertahap, alumni-alumni KAMMI berafiliasi dengan politik PKS. Sebetulnya, kalau kita baca sejarah KAMMI itu kan tidak bisa dilepas dari sejarah masjid kampus, dan sejarah masjid kampus itu tidak bisa lepas dari sejarah pencarian beberapa model di masjid kampus, dan diantara model yang menonjol itu adalah modelnya Salman. Sejak zaman Pak Natsir dulu, ada perhatian untuk membina mesjid kampus, sampai kemudian ditemukanlah sistem *Tarbiyah*, yang sebetulnya itu disebut sebagai *usroh*, yang diisbatkan sebagai temuan metodologi pergerakan yang dikembangkan oleh Hasan Albana. Nah, itulah kira-kira yang terbaik dan paling menonjol yang kita bisa rasakan hasilnya waktu itu. Sederhananya, kita tidak mau benturan dengan politik kampus, caranya kita cari pojok bisa bikin mushalla, syukur kalau ada masjid. Kita bikin semacam pengajian ajalah. Karena pengorganisasiannya itu disiplin, kenapa bisa disiplin? Karena memang sifat-sifat yang di maksudkan bagi kader itu ada anasir-anasir kedisiplinan di situ, yang terkait dengan akidahnya, ibadahnya, kontribusinya, dsb. Betul-betul diatur bahwa yang disebut dengan kader *Tarbiyah* ini adalah mereka yang memiliki kemampuan sebagai kader, itu dipraktekkan secara sangat disiplin. Pencarian yang dimulai sukses di awal tahun 80-an itu lah yang kita petik hasilnya, sekitar tahun 90-an akhir, ketika Soeharto mau jatuh, organisasi ini kemudian ketemu di Malang, dideklarasikanlah KAMMI di situ sebagai wujud eksternalnya.”²⁹

Penegasan Fachri Hamzah tersebut menegaskan bahwa ideologi yang dianut oleh KAMMI merupakan campuran antara kepentingan umat Islam (anggota KAMMI) dan pemikiran cendekiawan atau ulama Islam, seperti Muh. Natsir dan Hasan Albana yang dipengaruhi Islam sebagaimana Deliar Noer mengakui adanya ideologi seperti itu. Deliar Noer melihat ideologi yang dianut suatu kelompok atau organisasi yang berasal dari ajaran agama yang dijabarkan sedemikian rupa yang merupakan campuran antara kepentingan dan pemikiran manusia yang dipengaruhi agama.

Berbeda dengan B.J. Habibie yang mendapat dukungan dari elit politik dan HMI dan KAMMI atas dasar ideologi Islam, Abdurrahman Wahid justru mendapat penolakan dari dari elit politik Islam dan BEMSI karena dianggap tidak lagi menganut ideologi Islam. Kedekatan Abdurrahman Wahid dengan kelompok

²⁹ Wawancara dengan Fachri Hamzah, Mantan Ketua KAMMI pendukung pemerintahan B.J. Habibie, Sabtu tanggal 03 April 2010 di Cibubur.

Islam Liberal, kelompok-kelompok non-Islam yang resisten terhadap Islam, kelompok dan pro negara Yahudi (Israel) membuat Abdurrahman Wahid dinilai tidak konsisten dengan ideologi Islam yang dianutnya. Sebagaimana dijelaskan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI mengatakan :

“Awalnya itu bahwa kita anggap Gus Dur sudah tidak relevan lagi memimpin Indonesia, kebijakan-kebijakannya yang bicaranya dulu pro-demokrasi, anti demokrasi. Tidak pro rakyat, sehingga kita tergerak untuk menggantikan rezim. Yang kedua adalah soal ideologi itu datangnya belakangan kita lihat kebijakannya yang pro Israel, yang begitu dekat dengan kekuatan yang anti Islam, lalu polarisasi gerakan di lapangan itu jelas bahwa teman-teman pendukung Gus dur, jelas ideologinya berbeda dengan anti Gus Dur.”³⁰

Penjelasan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI tentang penentangan terhadap Abdurrahman Wahid atas dasar ideologi dibenarkan oleh Muhaimin Iskandar, elit politik PKB pendukung Abdurrahman Wahid. Muhaimin Iskandar mengatakan:

“Ada beberapa isu, dari Islam, Gus Dur dianggap tidak berpihak ke Islam, misalnya kasus-kasus Israel yang dianggap, Gus Dur dianggap pendiri Simon Perez Institute, tetapi KKN yang paling kencang, *Bullogate* sama *Brunaigate* sebagai kasus korupsi itu kencang sekali. Sampai sekarang Korupsi Gus Dur itu tidak/belum terbukti. Pengaruh ideologi Islam yang anti kuat sekali, karena beberapa elit yang ketemu saya menganggap Gus Dur, meninggalkan Islam, karena banyak orang Islam yang di singkirkan, karna asumsinya dulu Gus Dur naik dari partai-partai Islam, ideologis nya mungkin itu yang di sosialisasikan ke mahasiswa anti Gus Dur yang sebagian besar Islam.”³¹

Penegasan Muhaimin Iskandar tersebut menegaskan bahwa ideologi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya polarisasi ditubuh gerakan mahasiswa masa Abdurrahman Wahid.

6.1.2. Dukungan dan Penolakan Atas Dasar Kepentingan Politik

Dukungan KAMMI terhadap B.J. Habibie bukan saja atas dasar ideologi semata-mata, tetapi juga atas dasar politik. Berbeda dengan Ahmad Sumargono yang mendukung terhadap B.J. Habibie atas dasar ideologi dan atas dasar politik. Sebagaimana penjelasan dari Ahmad Sumargono yang mengatakan:

³⁰ Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid., Kamis, 25 Maret 2010, di Jakarta.

³¹ Wawancara dengan Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Senin, 22 Maret 2010, di Jakarta.

“Cuma yang paling saya sayangkan, ketika Habibie mendapat goncangan waktu itu, itu yang namanya Amien Rais dia tidak berpihak kepada Habibie, entah barangkali dia mau ambil kekuasaan itu. Saya saksi hidup, ketika Habibie didemo oleh gerakan-gerakan kiri di Senayan, Senayan di kuasai oleh kelompok-kelompok kiri itu, termasuk Adnan Buyung Nasution, Emil Salim, dan mahasiswa yang hampir sebulan, dia mengibarkan bendera penghinaan kepada Habibie. Saya tidak punya hubungan emosional dengan Habibie, ketika dia mendapat hinaan, Habibie biadab, Habibie turun. Pada masa peralihan itu, saya dengan kawan-kawan, dengan kekuatan-kekuatan Islam, merencanakan untuk menembus ini, kita usir orang-orang yang ada di DPR. Saya pada waktu itu sebagai Korlap, MS. Ka’ban sebagai Wakil Korlap menyerbu Senayan. Kita datang ke sana, kita turun, dan kita kuasai, kita cuma sehelai tambang gitu, sudah berhadapan, ada satu orang yang mukul saja, akan terjadi pertumbuhan darah. Itu sampai salah satu seorang tokoh dari Aceh teriak-teriak, tapi tidak ada gitu-gitu. Kemudian pada saat kita menyerbu, kita dapat selebaran dari temen-teman dari PKS, waktu itu masih bernama Tarbiyah, pada saat itu mereka bikin acara di Al-Azhar, pada waktu yang sama, bikin selebaran bahwa pertemuan di Senayan dibatalkan, dipindahkan ke Al-Azhar, di sana pembicara Amien Rais. Politik apa ini, saya bingung, kalau kita kan gak ada kepentingan apa-apa. Solidariti keummatan.³²

Fachri Hamzah mengakui dukungan KAMMI terhadap B.J. Habibie atas dasar politik dengan mengatakan:

”Jadi waktu itu, sebetulnya termasuk di antara kalangan teman-teman KAMMI sendiri, banyak yang tidak paham itu situasi. Jadi, mereka menganggap Habibie sama dengan Soeharto, suatu pandangan yang saya sendiri saya tentang. Karena, Orde Baru tanpa Soeharto itu sendiri itu sudah selesai. Sebab roh daripada Orde Baru itu, yah Soeharto sendiri. Roh dalam arti yang berhasil membangun kekuatan secara permanen, yang paling kuat *networknya* itu, cuman Soeharto. Di luar itu tidak akan ada lagi yang bisa dianggap, direspek oleh kekuatan yang kita sebut Orde Baru itu. Habibie tidak bisa menjadi tokoh. Siapa dia? Dia bukan tentara, dia bukan orang Jawa, dia sebetulnya, yah di Golkar bolehlah, tapi basisnya kan bukan politisi, memang dia Ketua Dewan Pembina Golkar. Cukup kuatlah, tapi kita tau, bahwa Habibie, akarnya itu, kepada aktivitas politik baik dalam birokrasi, dalam ABRI dan Golkar itu, tidak kuat. Kemudian tidak punya kharisma seperti yang dibangun oleh Soeharto selama itu kan, tidak ada. Karena itu, saya nganggap, apalagi secara pribadi saya banyak membaca tentang Habibie, dan saya dekat dengan Habibie sebetulnya karena Adi Sasono, karena saya bergaul dengan lama dengan Pak Adi Sasono. Jadi, alasan untuk menyebutkan seolah-olah Habibie itu sama dengan Soeharto, itu ngawur. Tidak ada basisnya, gitu. Apalagi Habibie, sebetulnya orang Jerman yah, menurut saya yah, cara berpikinya itu tentang *freedom* dan lain sebagainya itu, beda dengan Soeharto. Jadi pandangannya tentang dunia itu.

³² Wawancara dengan Ahmad Sumargono, elit politik dan aktivis KISDI pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010.

Jadi Habibie itu manusia internasional, bahasa asing yang dikuasai begitu banyak. Dia berkomunikasi dengan orang asing, bahasa sehari-hari yang digunakannya. Jadi persepsi dan perspektifnya tentang demokrasi itu sangat kuat sekali. Dan itu terbukti, 7 bulan kekuasaannya itu, betul-betul dia gunakan secara efektif, untuk membangun fondasi bagi demokrasi, baik dalam 300-an UU yang dia buat selama itu, dan juga kemudian membangun kebebasan dan menyerahkan masyarakat itu untuk lebih partisipatif, dalam semua hal, termasuk dalam media, kebebasan pers. Jadi itu perbedaan saya dengan teman-teman itu. Saya banyak ditentang juga, saya menulis di *Republika* misalnya, suatu tulisan yang menjadi sebab di dalam KAMMI sendiri muncul dengan beberapa teman-teman ketika saya menentang cara-cara FORKOT, ketika mereka menghantam Habibie. Memang, bagi mahasiswa terlalu partisan pada waktu itu kalau membela Habibie, tapi buat saya menganggap bahwa pondasi demokrasi yang diletakkan oleh Habibie, diganti dengan keinginan anak-anak itu untuk membuat Presidium Nasional segala macam, buat saya ngawurlah. Yang punya akar pada keberlanjutan konstitusi sejarah dan kepastian keberlanjutan negara, itu adalah apa yang diletakkan oleh Habibie, bikin pemilu secepatnya, dengan reformasi yang mungkin dia lakukan selama dia menjadi presiden, gitu kan, itu yang lebih rasional. Dan ekonomi juga sangat cukup stabil dari 16.000/dollar menjadi 6.000/dollar. Tidak terbayangkan bahwa Habibie bisa punya prestasi seperti itu, dia memegang kekuasaan yang sangat *absurd* sebetulnya, tapi dia bisa mendapatkan kepercayaan asing, dia melakukan restrukturisasi utang, restrukturisasi ekonomi. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, para pengkritik itu sudah tidak melihat itu, jadi dasar sikap mereka terhadap Habibie, termasuk para kaum ekonom liberal itu pada waktu itu, adalah kebencian, bukan bahwa Habibie itu dinilai secara objektif. Ini yang membuat rasionalitas saya merasa terganggu. Maka saya lawan. Saya melihat waktu itu, Habibie perlu dibela, pada sidang MPR itu, pidato Habibie ditolak, terjadi penghianatan Golkar, dan penghianatan itu menyebabkan Pak Habibie itu, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak maju, sudahlah, itulah kelirunya orang membaca Habibie.³³

Penentangan BEMSI terhadap Abdurrahman Wahid secara politik ditegaskan oleh Andre Rosiade, bahwa BEMSI memiliki kepentingan politik untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid. Sebagaimana dijelaskan Andre Rosiade, dengan mengatakan:

“Awalnya kita hanya melakukan *pressure* politik, awalnya mengingatkan Presiden agar kembali ke rel yang benar, tapi ternyata Presiden di ingatkan malah selalu *membalelo*, dan akhirnya mau tidak mau kita sepakat bersama teman-teman kita ganti aja nih rezim Abdurrahman Wahid.”³⁴

³³ Wawancara penulis dengan Fachri Hamzah, Ketua Umum KAMMI masa pemerintahan B.J. Habibie dan pendukung B.J. Habibie pada tanggal 03 April 2010 di Jakarta.

³⁴ Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kamis, 25 Maret 2010, di Jakarta.

Sementara dukungan BEMI secara politik kepada Abdurrahman Wahid ditegaskan oleh Quddus Salam, Aktivist BEMI bahwa visi politik Abdurrahman Wahid sesuai dengan cita-cita politik BEMI. Quddus Salam mengatakan:

“Nah, disitu, terlihat bahwa Gus Dur memberikan gagasan-gagasan, memberikan visi ke depan, yang itu, hampir kita sulit temukan sampai hari ini, misalnya soal visi kemandirian, yang itu, hampir sama dimiliki oleh Soekarno, bagaimana Indonesia itu harus punya kemandirian sebagai bangsa, sampai misalnya dia mengambil pilihan yang tidak populer, seperti mencoba bersekutu dengan Cina dan India, kenapa harus bersekutu disini, ini memperlihatkan Abdurrahman Wahid membuat satu *gap* dari *gap-gap* yang besar di *world system* itu sebetulnya. Menurut saya dan kawan-kawan BEMI yang ada di Jawa Timur, memang ini menjadi pilihan yang menurut saya mempunyai visi ke depan. Yang kedua, dari sekian tokoh, menurut saya, Gus Dur, menjadi pemersatu, yang saat itu memang ada dua kutub besar, kelompok-kelompok Muslim yang cukup radikal dengan kelompok-kelompok yang orang menganggap ini kelompok nasionalis yang dianggap kaum kiri. Nah ini menjadi dua muara besar yang saling berbenturan, nah Gus Dur mengambil di jalan tengah ini. Menurut saya, beliau menjadi satu pengikat dari dua arus besar, nah itu menjadi satu bentuk untuk menyelamatkan negara ini. Nah itulah dua alasan utama, kenapa saat itu kita harus mendukung Gus Dur.”³⁵

Penegasan Aktivist BEMSI, Andre Rosiade dan Aktivist BEMI, Quddus Salam, semakin menegaskan bahwa polarisasi gerakan mahasiswa masa Abdurrahman Wahid terjadi karena perbedaan kepentingan politik ditubuh BEMSI dan BEMI.

6.2. Kepentingan Mahasiswa dan Elit Politik Masa Pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid

6.2.1. Kepentingan Politik dan Ideologi Gerakan Mahasiswa

Fenomena gerakan mahasiswa yang mendukung dan menolak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologisnya. Secara politik gerakan mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan elit politik pendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid cenderung menerima B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sebaliknya, gerakan mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan elit politik penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid cenderung menolak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

³⁵ Wawancara dengan Quddus Salam, Aktivist BEMI 2000 s.d 2001, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Jawa Timur, Jumat, 02 April 2010, di Cikini, Jakarta.

Dari sisi kepentingan politik, gerakan mahasiswa yang memiliki hubungan dengan elit politik pendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menjadi pendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sebaliknya, gerakan mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan para elit politik yang beroposisi terhadap B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid bersikap anti terhadap B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Begitu pula secara ideologis gerakan mahasiswa yang memiliki basis ideologis Islam dan memiliki hubungan dengan elit politik yang juga berideologi Islam cenderung mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Baik B.J. Habibie maupun Abdurrahman Wahid keduanya dilihat sebagai representasi tokoh Islam mendapat dukungan dari gerakan mahasiswa dan elit politik yang memiliki kepentingan ideologis. Fenomena kepentingan ideologis dapat dicermati dari sikap dan tindakan politik gerakan mahasiswa dan elit politik yang berbasis Islam yang sebelumnya mendukung tapi lalu kemudian kembali menolaknya setelah melihat Abdurrahman Wahid tidak lagi konsisten dengan Islam.

Polarisasi gerakan mahasiswa yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ideologis menjelaskan adanya konflik politik seperti yang ditegaskan Maswadi Rauf. Adanya konflik politik dicirikan oleh dua hal, yaitu: (1) terjadinya perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok pergerakan mahasiswa. Sebab, konflik politik sifatnya mengarah kepada konflik kelompok; (2) gerakan mahasiswa yang terlibat dalam konflik memiliki keterkaitan dengan pejabat politik atau pejabat pemerintahan dan kebijakan.³⁶ Konflik politik antara gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid dan pergerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid memiliki keterkaitan dengan jabatan dan kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Dalam konteks demokrasi, konflik politik yang dibuktikan oleh adanya polarisasi dan perpecahan gerakan mahasiswa dalam mendukung dan menolak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid merupakan perwujudan dari konsep kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat. Dua gerakan mahasiswa yang saling berhadapan tidak hanya melaksanakan sebagian namun juga menuntut

³⁶ Lihat Maswadi Rauf, *Op.Cit.*, hal. 2.

pelaksanaan semua persyaratan-persyaratan demokrasi yang menjadi inti dari kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan Maswadi Rauf. Adapun persyaratan-persyaratan demokrasi yang marak dilaksanakan adalah kebebasan berbicara dan berkumpul dalam bentuk aksi-aksi dukungan dan penolakan. Sedangkan persyaratan-persyaratan demokrasi yang dituntut adalah pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif, serta pemerintahan yang tergantung pada pengawasan DPR.

Polarisasi dan perpecahan gerakan mahasiswa dalam mendukung dan menolak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga memperlihatkan betapa demokrasi yang dirumuskan Larry Diamond berusaha diimplementasikan. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan majelis yang semuanya dalam konteks kompetisi dan partisipasi secara bermakna diimplementasikan dalam bentuk polarisasi dan perpecahan gerakan mahasiswa dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.³⁷

6.2. 2. Kepentingan Politik dan Ideologi Elit Politik

Secara umum gerakan mahasiswa di berbagai daerah menyikapi hasil Pemilu 1999 dengan sangat kritis. Di satu sisi mereka tidak bisa pungkiri kalau Pemilu 1999 merupakan pemilu yang cukup demokratis di era transisi demokrasi, tetapi di lain sisi mereka juga resisten dengan tampilnya aktor-aktor politik lama yang dikhawatirkannya justru menjadi kekuatan konservatif. Resistensi itu sangat beralasan karena meskipun aktor-aktor politik lama itu merupakan hasil Pemilu 1999 dan dapat berbicara tentang reformasi, namun paradigma berpikir dan perilaku politiknya bisa saja tetap konservatif.³⁸

Kekhawatiran tersebut juga didasarkan pada konfigurasi kekuatan politik hasil Pemilu 1999 yang tidak menampilkan perbedaan fundamental dengan hasil Pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Kekhawatiran terhadap Pemilu 1999, disebutkan oleh Eros Djarot, elit politik PDIP bahwa Pemilu 1999 hanyalah akal-akalan Orde Baru untuk memecah kelompok penentang B.J. Habibie. Eros Djarot mengatakan:

³⁷ Lihat demokrasi yang dirumuskan Larry Diamond dalam Larry Diamond, *Op.Cit.*, hal. 8.

³⁸ Lihat Mahfudz Sidiq, *Op. Cit.*, hal.236-237.

“Pemilu, itukan akal-akalannya Orde Baru aja untuk memecah kita semua, saya sudah paham itu, dan saya katakan jangan terima, dan betul saja, karena ini adalah perpanjangan Orde Baru, maka dia (B.J. Habibie) buat sedemikian rupa struktur seolah-olah demokrasi itu ditumbuhkan.”³⁹

Pemilu 1999 tetap menampilkan partai-partai politik lama sebagai peraih suara signifikan, seperti PDI-P dan Partai Golkar dimana kedua partai itu menampung sejumlah tokoh-tokoh lama yang pernah berada di lingkaran kekuasaan Orde Baru. Partai pendatang baru, seperti PAN yang didirikan oleh Amin Rais dan PKB yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid tetap berada di bawah PDI-P dan Partai Golkar. Oleh karena itu kekhawatiran akan potensi konservatisme yang dihasilkan Pemilu 1999 masih sangat kuat, karena konfigurasi kekuatan politik masih diperkuat oleh kehadiran TNI/Polri di DPR yang memperoleh 38 kursi yang jauh melampaui perolehan kursi partai-partai yang tumbuh di era reformasi.

Konfigurasi kekuatan politik seperti itulah yang dikhawatirkan muncul, sehingga sebagian kelompok gerakan mahasiswa menolak percepatan pelaksanaan Pemilu 1999. Realitas ini membuat kelompok gerakan mahasiswa yang sejak awal menolak percepatan pemilu semakin bersemangat melakukan perlawanan dengan cara menolak Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999. Salah satu isu pokok yang diangkat oleh gerakan mahasiswa adalah penolakan pencalonan B.J. Habibie untuk pemilihan presiden RI pada Sidang Umum MPR, yang rencananya akan dicalonkan oleh Partai Golkar. Hal ini semakin mengkristalkan semangat perlawanan gerakan mahasiswa terhadap rezim Orde Baru, hingga berujung pada sikap penolakan mereka terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Bahkan sebagian elemen gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok sosial politik lainnya secara tegas meminta B.J. Habibie mundur dari pencalonannya sebagai Presiden.⁴⁰

Di antara pihak yang menolak pencalonan B.J. Habibie adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta yang dipimpin Icu Zulkafri yang menemui FPDI-MPR dan Forum Komunikasi Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FKA GMNI) Jakarta dan Jawa Tengah. Meskipun

³⁹ Wawancara dengan Eros Djarot, elit politik PDIP penentang B.J. Habibie, Minggu tanggal 27 Juni 2010 di Jakarta.

⁴⁰ Mahfudz Sidiq, *Op., Cit.*, hal.237.

KAHMI tidak menyebutkan dukungan ke salah satu Calon Presiden, namun intinya KAHMI tidak ingin jika MPR menerima pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Dalam pandangan KAHMI menerima pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie di satu sisi sama saja bila membukakan jalan kepada B.J. Habibie untuk kembali menjadi Presiden dengan legitimasi politik baru. Di lain sisi secara politik akan menutup rapat-rapat calon presiden yang akan diajukan oleh KAHMI nantinya.

Pasca Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR tahun 1999 kekhawatiran mahasiswa mulai terbukti. Naiknya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden dinilai oleh para aktivis mahasiswa tidak mampu memenuhi agenda reformasi total. Pengadilan Soeharto yang digelar pada bulan November 2000 yang dinilai sebagai sandiwara politik belaka ditolak oleh para aktivis mahasiswa. Departemen Pertanian, tempat pengadilan Soeharto digelar, dan kediaman Soeharto di jalan Cendana keduanya menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa.

Di berbagai daerah juga demikian. Para aktivis mahasiswa masih serentak meneriakkan tuntutan yang sama dengan cara mendatangi aset-aset Soeharto dan DPRD setempat. Agenda reformasi berupa pengadilan Soeharto yang dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto terus disuarakan. Para aktivis mahasiswa meminta pertanggungjawaban Soeharto atas keterlibatannya dalam; (1) pembunuhan sekitar tiga juta orang selama tiga tahun pertama Orde Baru berkuasa; (2) depolitisasi rakyat; (3) pelanggaran HAM yang terjadi setiap tahun; (4) korupsi, kolusi dan nepotisme; (5) perampasan tanah rakyat.

Pasca Sidang Umum MPR, Presiden terpilih Abdurrahman Wahid menyusun Kabinet Periode 1999-2004 (Lihat Lampiran 12) dengan melibatkan pimpinan partai politik, sehingga disebut sebagai Kabinet Persatuan Nasional. Secara politik sikap politik Abdurrahman Wahid yang melibatkan Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P dan Wakil Presiden), Amien Rais (Ketua Umum PAN dan Ketua MPR), Akbar Tanjung (Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR), Wiranto (Panglima ABRI) dalam penyusunan Kabinet dapat dilihat sebagai strategi Abdurrahman Wahid merangkul partai besar. Oleh karena itu munculnya penilaian bahwa sikap Abdurrahman Wahid yang mengakomodasi berbagai unsur

kekuatan politik dalam kabinetnya menunjukkan ketidakprofesionalannya sangat sulit ditepis. Akan tetapi justru sikap akomodasi Abdurrahman Wahid itulah, sehingga kabinetnya menuai kritik dan ketidakpuasan. Ada empat sumber kritik Kabinet Abdurrahman Wahid, yaitu: (1) masih terdapat elit politik Orde Baru; (2) masih terdapat sejumlah anggota TNI yang aktif; (2) banyak posisi menteri yang tidak sesuai dengan latar keahlian dan keilmuannya (*the right man in the wrong place*); (3) menteri-menteri bidang ekonomi tidak begitu *market friendly*; (4) postur kabinet yang memuat terlalu banyak pos, terdiri 35 orang menteri.⁴¹

Komposisi kabinet seperti itu menimbulkan dua implikasi fundamental, yaitu: (1) terjadi dualisme praktik sistem pemerintahan; (2) tidak ada terbangun oposisi permanen di parlemen yang dapat mengontrol kebijakan dan jalannya pemerintahan. Dualisme antara praktik sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan sistem Parlemen tampak dalam penyusunan kabinet. Padahal menurut UUD 1945, sistem Presidensial dicirikan oleh hak prerogatif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, karena menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada Presiden. Namun karena pengisian pos-pos menteri lebih didasarkan pada pertimbangan “koalisi” berbagai kekuatan yang ada, maka penerapan sistem Presidensial menjadi kabur.

Proses penyusunan kabinet yang melibatkan pimpinan partai politik, seperti Ketua Umum PDI-P, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar dan Panglima ABRI pada hakekatnya menegaskan lemahnya hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu proses penyusunan kabinet yang tidak dilakukan sendiri oleh Presiden dan mayoritas anggota kabinetnya berasal dari partai politik, atau setidaknya dijamin oleh partai politik menunjukkan model pemerintahan yang dianut Abdurrahman Wahid telah mengadopsi sistem semi-parlemen. Konsekuensi diadopsinya model seperti itu, yaitu bahwa para anggota kabinet lebih loyal kepada partainya dibanding kepada atasannya Presiden Abdurrahman Wahid, seperti yang tampak dalam ketegangan antara Abdurrahman Wahid dengan wakil-wakil partai politik di DPR.

Komposisi kabinet yang mayoritas anggotanya berasal dari kekuatan politik signifikan terutama partai politik membuat Abdurrahman Wahid kesulitan dalam

⁴¹ Munafrizal Manan, *Ibid.*, hal.125.

mengontrol kebijakan menteri-menterinya. Anggota DPR cenderung tidak optimal dalam mengawasi dan mengoreksi menteri yang berlatar partai —atau yang mendapat garansi dari partai politik. Akibatnya, *check and balances* yang dapat mendorong kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid menjadi lemah. Kondisi ini semakin krusial ketika Abdurrahman Wahid dalam perombakan kabinetnya juga memasukkan sejumlah aktivis LSM dan tokoh kritis ke dalam kabinet dan ekstra-kabinetnya. Di satu sisi lemahnya *check and balances* membuat Abdurrahman Wahid semakin percaya diri melakukan tindakan atau kebijakan kontroversial, sementara di lain sisi tindakan atau kebijakan kontroversial itu justru digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk menyerangnya.

Posisi Abdurrahman Wahid semakin lemah ketika muncul reaksi dari gerakan mahasiswa. Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) yang beranggotakan Badan-Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia menilai pemerintahan Abdurrahman Wahid berjalan tanpa kontrol. JMI menyayangkan tidak adanya satu partai politik yang ingin memposisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Bahkan TNI/Polri yang dituntut oleh JMI meninggalkan gelanggang politik justru ikut serta dalam koalisi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ketiadaan oposisi membuat aktivis mahasiswa menyerukan kepada semua elemen gerakan mahasiswa untuk memposisikan diri sebagai oposisi karena para politisi dianggap sudah terjebak pada kepentingan-kepentingan politik sesaat.⁴²

Belum genap satu tahun, perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah membuyarkan berbagai pandangan dan harapan banyak kalangan terutama masyarakat, pengamat politik dan terutama aktivis mahasiswa yang tengah menunggu momentum. Perilaku politik Abdurrahman Wahid seolah-olah secepat kilat menghancurkan koalisi dan kompromi yang susah payah dibangun oleh Poros Tengah dan yang membawanya ke tampuk kekuasaan kepresidenan. Runtuhnya bangunan koalisi pemerintahan berimbas kepada rapuhnya koalisi di DPR yang semula dikhawatirkan oleh banyak pihak tidak mampu bersikap kritis terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dengan cepat, DPR berubah wajah menjadi kekuatan oposisi yang “galak” terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.

⁴² Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.247.

Untung Wahono⁴³ menyebutkan setidaknya ada enam tindakan politik presiden Abdurrahman Wahid yang menyebabkan pecahnya koalisi pemerintahan dan koalisi di DPR, yaitu: (1) keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka hubungan dagang dengan Israel; (2) tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengusulkan pencabutan Tap MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang pelarangan ajaran dan Partai Komunis di Indonesia; (3) sikap Presiden Abdurrahman Wahid dalam konflik Maluku yang dianggap terlalu meremehkan dan cenderung menyalahkan umat Islam; (4) Presiden Abdurrahman Wahid dianggap tidak memiliki *sense of crisis* karena terlalu sering bepergian ke luar negeri yang menghabiskan banyak uang negara; (5) Presiden Abdurrahman Wahid dipandang terlalu mudah untuk memecat dan mengganti para Menteri yang dianggap bermasalah; (6) sikap inkonsistensi yang tinggi pada diri Presiden Abdurrahman Wahid, yang akhirnya banyak membingungkan berbagai kalangan, termasuk jajaran kabinetnya sendiri; (7) pemerintahan Abdurrahman Wahid ternyata tidak kebal terhadap penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Keinginan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka hubungan dagang dengan Israel membuat marah umat Islam yang mendukung Palestina, ibarat membangunkan “singa lapar”. Gagasan ini mendapat reaksi penolakan keras terutama dari partai-partai di Poros Tengah dan PAN. Membuka hubungan dengan negara Zionis bukan saja melanggar ketentuan Resolusi PBB Nomor 242, namun juga menyakiti perasaan umat Islam. KAMMI merupakan salah satu elemen gerakan mahasiswa Islam yang menentang keras rencana Presiden Abdurrahman Wahid. Sepanjang bulan Oktober sampai November 1999, KAMMI di berbagai daerah dan juga di Jakarta menggelar sejumlah aksi-aksi demonstrasi besar menentang dan mengecam rencana Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.⁴⁴

Tindakan politik Presiden Abdurrahman Wahid berikutnya adalah mengusulkan pencabutan Ketetapan MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang pelarangan ajaran dan Partai Komunis di Indonesia. Gagasan ini mendapat reaksi keras dari Fraksi PBB dan Fraksi PPP di DPR dan dari berbagai ormas Islam di luar DPR. Fraksi PBB, misalnya, secara tegas menyatakan penolakannya

⁴³ Untung Wahono, *Peran Politik Poros Tengah Dalam Kancah Perpolitikan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003.

⁴⁴ Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, hal.248.

atas gagasan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan melanggar sumpah jabatan. Bahkan FPBB menghimbau semua fraksi di DPR untuk membicarakan pelanggaran serius Presiden ini dan kemudian dipertimbangkan konsekuensi konstitusionalnya.⁴⁵ Namun di kalangan gerakan mahasiswa, gagasan Abdurrahman Wahid itu tidaklah menjadi wacana serius, termasuk di KAMMI. Hanya sebagian kalangan KAMMI yang menampakkan kekhawatirannya mengenai masalah ini.⁴⁶

Juga sikap Presiden Abdurrahman Wahid dalam konflik Maluku yang dinilai cenderung menyalahkan umat Islam. Kemarahan umat Islam ditunjukkan oleh partai Islam dan PAN di DPR. Di masyarakat, kekecewaan dan kekesalan terhadap Abdurrahman Wahid diungkapkan dalam “Aksi Sejuta Umat” di Lapangan Monas sebagai ekspresi keprihatinan umat Islam terhadap konflik Maluku. Bahkan kehadiran tokoh-tokoh Poros Tengah di acara tersebut telah membuat gusar Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga Abdurrahman Wahid merasa perlu menyatakan bahwa tokoh-tokoh tersebut “mencari penyakit”.⁴⁷ Bagaimana pun juga kasus Maluku termasuk yang paling banyak mengundang kecaman dari kalangan umat Islam terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid. Elemen gerakan mahasiswa, seperti KAMMI sejak merebaknya konflik ini telah berulang kali melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut pihak pemerintah menuntaskan kasus tersebut. Namun, berlarut-larutnya konflik ini mengakibatkan menajamnya kritik mereka terhadap pemerintah.⁴⁸

Selain masalah Maluku, KAMMI juga mengkritisi pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam masalah Aceh. Serangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota digelar oleh KAMMI menuntut penyelesaian kasus Aceh. Pada hari Jum’at tanggal 3 Desember 1999, sekitar seribuan massa KAMMI peduli Aceh mendatangi Gedung DPR/MPR dengan membawa sejumlah tuntutan, antara lain: (1) menuntut jaminan keamanan bagi rakyat sipil di Serambi Mekkah; (2) diberikannya keleluasaan bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan syari’at Islam; (3) menolak segala bentuk kekerasan dan militerisme di Aceh;

⁴⁵ *Ibid.*, hal.248.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.248.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.248-249.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.249.

(4) menuntut pemerintah mengadili para pelaku kejahatan HAM selama berlangsungnya Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.⁴⁹

Sumber kritik lainnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid dianggap tidak memiliki *sense of crisis*. Sering berpergian ke luar negeri tanpa hasil yang sebanding, uang negara yang habis merupakan isu yang kerap dilontarkan oleh elemen gerakan mahasiswa. Krisis ekonomi yang mengakibatkan penderitaan rakyat dan konflik sosial yang berlarut-larut justru disikapi oleh Abdurrahman Wahid dengan banyak ke luar negeri menghabiskan banyak uang negara untuk suatu diplomasi internasional yang tidak dirasakan pengaruhnya.⁵⁰ Bahkan tuduhan menghamburkan-hamburkan uang negara dikaitkan dengan dalam lawatannya ke luar negeri yang kerap mengikutsertakan sejumlah orang yang dinilai tidak jelas tujuannya.

Begitu pula tindakan Abdurrahman Wahid yang dinilai terlalu mudah memecat dan mengganti para menterinya dengan alasan yang tidak jelas. Pada tanggal 26 Agustus 2000, misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid me-*reshuffle* kabinetnya dengan melantik 26 menteri dari sebelumnya 35 kementerian. Sebelum melakukan *reshuffle*, Presiden Abdurrahman Wahid terlebih dahulu memecat empat orang menteri. Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid ini dinilai banyak kalangan lebih mencerminkan ketidakmampuannya dalam membangun tim yang solid dan menjadi tindakan menggali lobang bagi dirinya sendiri. Menurut Muhaimin Iskandar Elit Politik PKB dan Pendukung Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa *reshuffle* inilah awal mula konflik politik antara Abdurrahman Wahid dengan para penentangannya, Muhaimin Iskandar mengatakan:

“Awalnya berawal dari *reshuffle* kabinet, ketidakpuasan partai-partai pendukung Gus Dur. Kesalahannya melakukan pemberhentian beberapa Menteri dari partai seperti Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Laksamana Soekardi, Wiranto. Itu akar awal masalahnya kemudian di tambah keinginan Megawati untuk naik. Klop itu semua. Amien Rais juga gara-gara Mendiknas.”⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hal.249.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.249-250.

⁵¹ Wawancara dengan Muhaimin Iskandar, elit politik PKB pendukung Abdurrahman Wahid, Senin, 22 Maret 2010, di Jakarta.

Terkait hal ini Amien Rais bahkan pernah mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid agar tidak asal menggusur jajaran menteri, walaupun memiliki hak prerogatif. Sangat mengejutkan karena tindakan Abdurrahman Wahid tidak berhenti sebatas memecat dan mengganti kabinetnya, yang juga memicu konflik luas adalah kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.⁵²

Konflik semakin berlarut-larut ketika Abdurrahman Wahid tampak bersikap inkonsisten dalam banyak kasus dan pemerintahannya dinilai tidak kebal terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pernyataan-pernyataan politik dan tuduhan Abdurrahman Wahid bukan hanya membingungkan masyarakat, seperti menteri-menterinya yang dituding terlibat korupsi dan elit-elit politik yang dituding mendalangi konflik horizontal, namun juga meresahkan pihak-pihak yang ditudingnya. Banyak pihak yang menilai bahwa KKN yang tumbuh subur dalam waktu singkat dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid melampaui waktu yang dibutuhkan pemerintahan Soeharto. Upaya terbuka untuk menempatkan orang-orang Abdurrahman Wahid dan munculnya *broker-broker* politik baru dari kalangan petinggi NU yang membuka akses terhadap kekuasaan menjadi dasar ketidakpuasan berbagai pihak.⁵³

Kasus sumbangan Sultan Brunei dan penggunaan dana Yanatera Bulog yang membawa Presiden Abdurrahman Wahid ke dalam konflik terbuka dengan DPR bukan saja memperlihatkan adanya KKN di seputar Abdurrahman Wahid, tapi juga memperjelas adanya *broker-broker* politik baru di lingkaran kekuasaannya. *Buloggate* atau kasus dana nonbujeter Bulog bermula dari upaya Suwondo, tukang pijat Abdurrahman Wahid, untuk memanipulasi dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 miliar dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Abdurrahman Wahid. Juga oleh ambisi Wakil Kepala Bulog, Sapuan untuk menjadi Kepala Bulog. Meskipun secara hukum positif harus diakui bahwa Abdurrahman Wahid dinyatakan tidak terbukti terlibat di dalam kasus Bulog, tetapi sulit dielakkan bahwa Abdurrahman Wahid sebenarnya mengetahui keterlibatan orang-orang dekatnya itu dalam penyalahgunaan kekuasaan kepresidenan untuk kepentingan mereka masing-masing. Sebab di pengadilan, Suwondo dan mantan Wakil Kepala

⁵² Mahfudz Sidiq, *Op.Cit*, hal.250.

⁵³ *Ibid.*, hal.250.

Bulog, Sapuan terbukti bersalah. Pansus kasus Bulog dan kasus dana Sultan Brunei di DPR juga mengindikasikan adanya keterlibatan Abdurrahman Wahid. Sekurang-kurangnya secara tidak langsung, dalam pencairan dana nonbujeter Bulog terdapat indikasi keterlibatan Abdurrahman Wahid sebagaimana kesaksian Rusdihardjo atas pengakuan Abdurrahman Wahid yang memberikan selebar cek kepada Siti Farika.⁵⁴

Indikasi keterlibatan Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut dan cara Abdurrahman Wahid merespons tuduhan itu menjadi dasar dalam menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden. Baik pada saat klarifikasi yang dilakukan Pansus Bulog atas Abdurrahman Wahid maupun pada momentum pemberian jawaban terhadap memorandum pertama dan memorandum kedua DPR kepada Presiden, terlihat kecenderungan bahwa Abdurrahman Wahid menghindari substansi persoalan yang dituduhkan kepadanya. Presiden Abdurrahman Wahid malah mempersoalkan keabsahan dan kewenangan Pansus memeriksa dirinya. Sementara itu dalam kasus dana dua juta dollar AS sumbangan Sultan Brunei, Abdurrahman Wahid selalu mengemukakan argumen yang tidak kontekstual, seperti argumen bahwa dana zakat Sultan Brunei itu diterimanya dalam kapasitas pribadi, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Abdurrahman Wahid tidak menyadari bahwa argumennya merupakan perangkat politik bagi dirinya sendiri, sebab pejabat publik setingkat presiden, batas antara kapasitas pribadi dan kapasitas kelembagaan sangat sulit dibedakan.⁵⁵

Kecenderungan Abdurrahman Wahid untuk mau benar sendiri di satu sisi, dan mencampuradukkan posisi pribadi dan posisi publik di sisi yang lain, juga tampak dari jawabannya atas memorandum pertama dan kedua yang disampaikan kepada DPR. Ketika memberikan jawaban atas memorandum pertama, Abdurrahman Wahid justru kembali mempersoalkan legalitas Pansus *Buloggate-Bruneigate* dan mempersoalkan keabsahan DPR mengeluarkan memorandum kepada Presiden. Selain tidak memberikan klarifikasi atas tuduhan Pansus yang menjadi dasar keluarnya memorandum, Abdurrahman Wahid juga tidak konsisten menyampaikan perannya dalam pencairan dana Yanatera Bulog dan dana Sultan

⁵⁴ Syamsuddin Harris, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 2007, hal.109.

⁵⁵ *Ibid.*, hal.110.

Brunei. Abdurrahman Wahid justru mendahului DPR dengan mengatakan bahwa memorandum kedua tidak diperlukan lagi karena Presiden cukup tanggap terhadap memorandum pertama. Oleh karena itu tidak mengherankan bila DPR menanggapi negatif jawaban Presiden itu karena dianggapnya lebih berisi pembelaan atas posisi Abdurrahman Wahid ketimbang klarifikasi dan penjelasan atas substansi persoalan yang diajukan DPR melalui memorandum pertama.⁵⁶

Di luar masalah isu penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Abdurrahman Wahid yang tidak mampu dikontrolnya. Abdurrahman Wahid yang terperangkap dalam personalisasi kekuasaan lalu melakukan bongkar pasang kabinet selama pemerintahannya. Begitu seringnya bongkar pasang kabinet, sehingga para politisi partai di DPR menjadi skeptis terhadap anggota kabinet yang dipilihnya. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid melakukan 13 kali bongkar pasang kabinet, termasuk dua kali *reshuffle* secara besar-besaran pada Agustus 2000 dan awal Juni 2001.

Konflik terbuka dengan elit partai politik besar DPR muncul ketika Abdurrahman Wahid; (1) menekan Hamzah Haz mundur dari jabatannya sebagai Menko Kesra dan Taskin; (2) mencopot Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN; (3) memberhentikan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Tekanan terhadap Hamzah Haz dan pemberhentian Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla dengan tuduhan terlibat KKN itulah yang menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan politisi partai DPR, terutama PPP, PDIP dan Golkar, karena Abdurrahman Wahid tidak dapat memberikan penjelasan spesifik tentang tuduhan itu. Bahkan kekecewaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga sebagai Wakil Presiden atas tuduhan Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid itu diperlihatkannya dengan meminta Laksamana Sukardi melakukan pembelaan diri.⁵⁷

Kekecewaan PDI-P, Partai Golkar dan PPP terhadap Abdurrahman Wahid bukan karena kader-kadernya diberhentikan atau tidak diberhentikan dari keanggotaan kabinet. Melainkan pada cara yang digunakan Abdurrahman Wahid

⁵⁶ Lihat Syamsuddin Harris, *Ibid.*, hal.111.

⁵⁷ Tentang kekecewaan Partai Golkar, PDI-P dan PPP lihat Syamsuddin Harris, *Ibid.*, hal.113-114.

yaitu dengan melakukan tekanan dan menudingnya terlibat KKN tanpa disertai penjelasan dan proses hukum. Oleh karena itu konflik tidak akan pernah muncul sekiranya pemberhentian kader PDIP, Partai Golkar dan PPP hanya semata-mata didasarkan pada argumen demi untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Sebab, baik PDI-P maupun Partai Golkar dan PPP sadar betul bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri menurut konstitusi (UUD 1945) merupakan kewenangan (hak prerogatif) presiden. Namun karena tekanan dan tuduhan Abdurrahman Wahid tanpa disertai dasar dan bukti yang meyakinkan sehingga membuat para politisi PDIP, Partai Golkar dan PPP kecewa terhadap tindakan Abdurrahman Wahid. Akan tetapi tindakan Abdurrahman Wahid yang memberhentikan anggota kabinetnya dengan cara menudingnya terlibat KKN di satu pihak bermaksud meredam ketidakpuasan publik, namun di lain pihak telah menebarkan kekecewaan di kalangan elit yang justru memiliki basis massa yang kuat.

Para politisi PDIP, Partai Golkar dan PPP mempersoalkan cara yang ditempuh Abdurrahman Wahid dalam memberhentikan kader-kadernya, dan bukan pada kewenangannya. Kasus Hamzah Haz dan Wiranto, misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid mendesak kedua menterinya itu mundur dari jabatannya di hadapan publik tanpa pernah memberi penjelasan yang dapat diterima oleh kalangan elit PPP dan elit militer. Sementara pengangkatan Basri Hasanuddin yang bukan kader PPP sebagai pengganti Hamzah Haz, menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid telah mengabaikan hasil kompromi politik mengenai komposisi partai-partai Islam dalam kabinetnya yang dicapai sebelum dan sesudah pembentukan kabinet.⁵⁸

Begitu pula dengan Wiranto yang didesak mundur di depan publik, Abdurrahman Wahid justru menyampaikannya ketika sedang melakukan kunjungan keliling ke sejumlah negara Eropa. Padahal terlepas dari isu pelanggaran HAM yang melilit Wiranto, Presiden Abdurrahman Wahid mestinya tidak lupa bahwa Wiranto —dan Hamzah Haz— termasuk sedikit tokoh yang diajaknya dalam penyusunan Kabinet Persatuan Nasional. Oleh karena itu sungguh terkesan dibuat-buat bila tekanan dunia internasional yang menjadi dasar

⁵⁸ Syamsuddin Haris, *Ibid.*, hal.114-115.

bagi Abdurrahman Wahid untuk menekan mundur Wiranto. Bagaimana pun juga secara politik isu pelanggaran HAM di Timor Lorosae yang melilit Jenderal Wiranto tidak dapat dijadikan lagi dasar bagi Abdurrahman Wahid untuk menekan Wiranto, apalagi dengan mengungkapkan persoalan domestiknya di luar negeri. Sebab, isu pelanggaran HAM berat yang melibatkan nama Wiranto sudah muncul sebelum oleh Abdurrahman Wahid menyusun kabinetnya. Pemberhentian Wiranto, memang mempengaruhi dukungan para perwira TNI kepada Abdurrahman Wahid meski hal ini dibantah oleh Letjend. (Purn.) Agus Widjojo, Kaster TNI pada Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Itu keputusan politik. Di TNI sendiri gak ada pengaruhnya. Itu kan dipecat pada waktu dia Menkopolkam. Tidak betul Pak Wiranto membawa institusi untuk setia mendukung dia masuk politik. Gak ada itu. Selepas dari Panglima, dia masuk politik, secara individu.”⁵⁹

Tetapi sikap para perwira TNI terhadap Abdurrahman Wahid terkait soal supremasi sipil dan mengangkat Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad sedikit banyak berubah dan menimbulkan friksi dikalangan perwira TNI. Letjend (Purn.) Agus Widjojo, Kaster TNI pada Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Tafsiran Gus Dur atas supremasi sipil, saya mencoba menafsirkan, bahwa seolah-olah sebagai panglima tertinggi, Gus Dur mempunyai kewenangan tak terbatas atas TNI, termasuk dalam menjangkau masuk sangat dalam ke dalam TNI, seolah-olah Gus Dur bisa memilih perwira siapa pun yang siap dijadikan Panglima TNI. Disinilah mencuat kasus Letjend. Agus Wirahadikusumah. Yang menimbulkan gejolak perlawanan dari internal TNI khususnya TNI AD. Disini kita melihat ujian-ujian yang paling tajam bagi TNI dalam perannya yang baru untuk tidak terlibat dalam politik.”⁶⁰

Tindakan mengabaikan hasil kompromi partai politik juga dilakukan Abdurrahman Wahid ketika memecat Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla. Dalam kasus Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid tidak hanya mengganti dua orang menteri itu dengan tokoh dari partai yang berbeda, tetapi juga tidak memberikan penjelasan yang

⁵⁹ Wawancara dengan Letjend. (Purn.) Agus Widjojo Kepala Staf Teritorial TNI Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

⁶⁰ Wawancara dengan Letjend. (Purn.) Agus Widjojo Kepala Staf Teritorial TNI Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

memadai tentang alasan pencopotan kedua anggota kabinetnya itu sendiri. Oleh karena itu tidak mengherankan bila kemudian pemecatan Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla bermuara pada penggunaan Hak Interpelasi oleh 332 anggota DPR.

Bagaimana pun juga tindakan Abdurrahman Wahid yang memberhentikan Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla menunjukkan sikap pengabaianya terhadap kompromi antar partai politik besar termasuk TNI yang dicapai pada awal dan menjelang pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Sikap TNI terhadap tindakan Abdurrahman Wahid ini dijelaskan oleh Letjen. (Purn.) Fahrul Rozi, Wakil Panglima TNI yang diberhentikan oleh Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Kalau masalah sikap ada dua, satu, berbicara masalah garis komando yah, TNI itu pasti taat kepada Presiden karena bagaimanapun, Presiden adalah Panglima tertinggi TNI, tapi pada saat itu kan TNI masih punya fungsi demokrasinya, masih ada fraksi TNI dan lain sebagainya, kalau dari aspek itu, yah bagaimana pun TNI melihat mungkin ada putra atau putri dari bangsa yang lebih baik untuk menjadi Presiden ke depan, terutama kan Gus Dur ini sangat membatasi yah, terutama membatasi dia untuk menunjukkan kapasitasnya selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau dilihat dari aspek yang kedua ini, yah memang kalau ada calon dari kami, atau upaya untuk mengganti beliau dengan yang lain yang lebih baik, kami dukung. Ada *joke* teman, salah satu pejabat dulu pernah mengatakan begini, “saya tidak mengatakan Gus Dur itu jelek, tapi bagaimanapun *handycap* penglihatannya itu menyebabkan bangsa ini menjadi payah”. Waktu itu ada yang mengatakan, waktu itu kan Wakilnya Bu Mega, “ bagaimana dengan Bu Mega? Karena bagaimana pun Bu Mega masih bisa melihatlah, mungkin itu masih lebih baik gitu”. Jadi kembali ke masalah tadi, bagaimana sikap TNI terhadap Gus Dur sebagai Presiden, kalau ngomong dari segi garis komando, pasti lah, gak mungkin ada perintah *anu* yang tidak ditaati oleh TNI, tapi kalau ngomong dalam dunia demokrasi, dimana TNI punya hak bersuara, punya hak memilih dan lain sebagainya, maka kita berpikir lebih baik punya Presiden yang *handycap*nya terbataslah, artinya jangan sampai *handycap*nya tidak bisa melihat. Sangat menyulitkan itu, apalagi nanti kalau ada pembisik ini lain, pembisik itu lain dan sebagainya. Tapi kalau masalah pencopotan saya, saya gak mempersoalkan itu, karena bagaimana pun, meskipun itu datangnya dari pembisik ini pembisik itu, itu sudah sebuah keputusan komando, kita taat. Kedua, mungkin sebagai manusia kita punya pilihan, kalau kita sudah tidak mempunyai *trust* dengan pemimpin kemudian kita digeser yah sudah, *Alhamdulillah*.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Letjend.(Purn.) Fachrul Rozi Wakil Panglima TNI, Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

Dengan lain perkataan bahwa Abdurrahman Wahid tidak lagi melihat hasil komprominya dengan partai-partai politik sebagai konsensus yang mengikat Abdurrahman Wahid secara politik. Abdurrahman Wahid seolah-olah tidak menyadari bahwa meskipun kesepakatan atau kompromi itu lebih merupakan *gentlement agreement* antar tokoh karena tidak berbentuk persetujuan yang bersifat hitam-putih dan ditandatangani masing-masing pihak, namun kesepakatan itu mempunyai konsekuensi politik bagi bila hal itu dilanggarnya. Padahal secara politik, Abdurrahman Wahid masih terikat untuk mempertahankan komposisi partai-partai di dalam kabinetnya, karena hanya dengan cara demikian Abdurrahman Wahid bisa mempertahankan kepercayaan partai-partai di DPR sekaligus mempertahankan pemerintahannya.⁶²

Pasca-Sidang Umum MPR 1999, situasi dimana Abdurrahman Wahid perlu mengajak para elit partai politik dalam pembentukan Kabinetnya sebagai bagian dari “politik balas jasa” atas keberhasilannya menobatkan dirinya menjadi presiden, maka Abdurrahman Wahid dituntut untuk mempertahankan “politik balas jasa” itu hingga akhir masa pemerintahannya. Benar bahwa penyusunan kabinet merupakan (hak prerogatif) Presiden, sehingga siapa pun juga tidak dibenarkan mempersoalkan sikap Abdurrahman Wahid yang menekan Hamzah Haz dan memecat Laksamana Sukardi dan Muahammad Jusuf Kalla. Namun persoalannya tidaklah sesederhana itu, sebab secara politik kemunculan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden yang dapat dilihat secara tiba-tiba itu merupakan produk dari kompromi politik antar elit partai politik yang tidak menghendaki B.J. Habibie dan yang menolak Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pada Pemilu 1999.

Bagaimana pun juga naiknya Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan dan kejatuhannya dari kursi kepresidenan tetap harus dihubungkan dengan sejumlah elit partai politik terutama yang bergabung di dalam koalisi Poros Tengah. Pada level atas, PAN, PPP, PKB dan Partai Golkar yang merupakan inti Poros Tengah merupakan kekuatan di tingkat elit, sedangkan pada tingkat bawah, *civil society* terutama kelompok-kelompok pluralisme merupakan inti dari kekuatan massa. Pada level elit setidaknya ada tiga penyebab mengapa

⁶² Syamsuddin Harris, *Ibid.*, hal.115-116.

Abdurrahman Wahid mendapat dukungan mayoritas dari elit politik untuk menjadi Presiden pasca gerakan Mei 1998, yaitu: (1) MPR menolak laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie; (2) tuntutan pembubaran Golkar mematahkan semangat Akbar Tanjung untuk mencalonkan diri; (3) Partai Golkar sebagai partai pemenang nomor dua tidak mendukung Megawati dan Amien Rais; (4) Abdurrahman Wahid dianggap sebagai tokoh pluralisme.

Akbar Tanjung, yang waktu itu menjadi Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan alasannya mendukung Abdurrahman Wahid dengan mengatakan:

“Alasan itu bahwa Golkar itu mempunyai resistensi yang kuat terhadap Ibu Megawati, Bu Megawati pada waktu itu kan menjadi figur yang kuat karena partainya pemenang pemilu. Bahkan opini juga dimunculkan bahwa partai pemenang pemilu wajar menjadi Presiden. Tapi karena pengalaman-pengalaman kita yang traumatik pada Pemilu 1999 dimana Golkar selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari PDI-P di dalam kampanye-kampanye mengalami terror, bahkan saya sendiri mengalami di berbagai tempat, Jawa Tengah, di Purbalingga orang-orang PDI-P mengganggu, mengacau. Di Brebes juga diganggu oleh orang-orang PDI-P. Di Tawangmangu waktu saya kampanye diganggu oleh orang-orang PDI-P. Di Jawa Timur khususnya di Jember bahkan kami diungsikan, dilarikan oleh Polisi karena dicegat oleh orang-orang PDI-P, orang-orang PKB juga sebetulnya. Demikian pula di Bali orang-orang Golkar dikejar, termasuk saya waktu kampanye di daerah Pegalen juga diganggu. Jadi resistensi terhadap PDI-P sangat kuat sehingga tidak mendukung Ibu Megawati dan kemudian karena Pak Habibie tidak lagi bersedia dan akhirnya dicarilah kompromi kan? Dan komprominya dukung Abdurrahman Wahid. Jadi Abdurrahman Wahid itu kalau dari segi Golkar itu alternatif yang terakhirlah, pilihan yang terakhir gitu. Sebetulnya terhadap Amien Rais, orang-orang Golkar juga tidak berkenan karena Amien Rais juga melakukan hal yang sama terhadap Golkar pada Pemilu 1999. Pernyataan-pernyataannya sangat menyakiti orang-orang Golkar. Itu akhirnya kita relatif bisa menerima Abdurrahman Wahid, karena itu kita memberikan dukungan terhadap Abdurrahman Wahid.⁶³

Sebaliknya, penyebab kejatuhannya adalah selain mengabaikan partai politik yang mengusungnya, Presiden Abdurrahman Wahid juga mengabaikan posisi politik Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ketika melakukan perombakan kabinet, baik pada perombakan pertama maupun pada perombakan kedua pada tanggal 1 Juni 2001. Pada perombakan pertama yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2000, Abdurrahman Wahid mendapat tekanan dari para politisi DPR untuk mengubah Sidang Tahunan MPR 2000 menjadi Sidang

⁶³ Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

Istimewa MPR. Sebagai kompromi dari konflik yang makin tajam itu, Abdurrahman Wahid kemudian menerbitkan Keppres Nomor 121 Tahun 2000 yang berisi pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan Presiden kepada Wakil Presiden. Namun kejatuhan Abdurrahman Wahid dipercepat oleh dua faktor, yaitu: (1) Abdurrahman Wahid tidak menggunakan perombakan dan penyusunan kembali kabinet pasca Sidang Tahunan MPR 2000 sebagai momentum untuk membangun kembali kepercayaan partai-partai besar terhadapnya dengan cara melibatkan Wakil Presiden Megawati di dalamnya;⁶⁴ (2) Megawati Soekarnoputri menjadi satu-satunya kekuatan yang paling siap. Sadar atau tidak sadar kebijakan Abdurrahman Wahid yang melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya itu kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri hanya semakin menguatkan posisi politik Megawati Soekarnoputri, sebagaimana dijelaskan oleh Muhyidin Arubusman, elit politik PKB pendukung Abdurrahman Wahid mengatakan :

“Kepentingan-kepentingan untuk mendongkel Gus Dur itu sudah kelihatan sekali. Ada Grup-grup di TNI kemudian Grup PDIP dengan Theo Syafei dkk dimana saya pernah bertemu mereka itu di Hotel Sultan, waktu itu kan masih ada pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, kepala negara Gus Dur, kepala pemerintahan Megawati. Waktu itu di Hotel Sultan, Theo Syafei sudah mengatakan bahwa mereka (PDIP) ingin Megawati naik. Hal ini terjadi tiga bulan menjelang Gus Dur lengser.”⁶⁵

Berbeda dengan pendukung dan penentang di level elit politik yang cenderung pada kepentingan politik, pendukung dan penentang gerakan mahasiswa terhadap Abdurrahman Wahid selain didasarkan pada kepentingan politik gerakan mahasiswa, juga atas dasar kepentingan ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok gerakan mahasiswa. BEMSI dan KAMMI yang dibina oleh PKS, misalnya, dengan ideologi Islamnya sangat keras menentang rencana kebijakan Abdurrahman Wahid yang ingin membuka poros Jakarta-Tel Aviv. Berbeda dengan FORKOT, penentang kapitalisme dan pendukung pluralisme memilih bersikap hati-hati dalam mendukung Abdurrahman Wahid. Hal itu diakui secara tersirat oleh Eli Salomo, Aktivis FORKOT dan FRONT KOTA, dengan mengatakan:

⁶⁴ Syamsuddin Harris, *Ibid.*, hal.116-117.

⁶⁵ Wawancara dengan Muhyidin Arubusman, elit politik PKB, Pendukung Pemerintahan Abdurrahman Wahid Kamis, 17 Juni 2009, di Jakarta.

”Bahwa Abdurrahman Wahid membuktikan komitmen tentang pluralitas Abdurrahman Wahid membuktikan konsistensinya tentang, misalnya pro sipil kemudian beberapa perombakan beberapa militer, termasuk juga pemecatan Wiranto. Termasuk juga misalnya pandangan beberapa kelompok, beberapa orang bahwa Abdurrahman Wahid juga bukan orang yang tunduk seratus persen kepentingan IMF sehingga beberapa program IMF dia inovasi sesuai kemauan dan kepentingan dia atau Indonesia lah saat itu. Tapi bagi kelompok yang lain memang dianggap, ini tokoh yang harus dijatuhkan karena semakin menjauhkan kepentingan politik kelompoknya dari rantai kekuasaan itulah komponen penilai kami tentang Abdurrahman Wahid. Memang ada sesuatu debat soal Bulog, kejadian *Buloggate* dan kemudian ini disimpelkan pada posisi soal Bulog ini. Kalau Abdurrahman Wahid ditumbangkan ini kan suatu kesesatan berpikir, di situlah pengalaman suatu proses politik yang setengah-tengah di DPR. Itu juga ketakutan kita soal Panitia Angket DPR sekarang ini. Karena transaksi politiknya bisa terjadi. Ada mungkin tapi kan itu tidak menjadi satu pemahaman yang umum.”⁶⁶

Selain kepentingan yang cenderung ideologis, juga terdapat kepentingan yang cenderung bersifat politis. Arif Rahman, Aktivis BEMI, secara tegas mengakui adanya kepentingan politik PMII dalam mendukung Abdurrahman Wahid. Arif Rahman mengatakan:

”Ya jelas kalau bicara kepentingan karena korelasi kita ke NU jelas kita punya kepentingan politik, tapi kepentingan politik itu ada dasarnya. Dasarnya adalah Abdurrahman Wahid ingin membangun demokrasi di Indonesia dengan mencabut Dwi Fungsi ABRI dan lain-lain. Itu yang melandasi bahwa Abdurrahman Wahid tokoh yang kita harus support dan jaga.”⁶⁷

Berkaitan dengan isu yang diusung, tidak banyak kelompok-kelompok gerakan mahasiswa yang mengangkat isu kinerja pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selama berlangsungnya Sidang Tahunan MPR 2000, hanya Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS) yang sangat keras menuntut diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR dan menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya. Sementara HMI yang mengkritisi kinerja pemerintah, mengajak masyarakat untuk secara kritis mengontrol jalannya pemerintahan Abdurrahman Wahid. Isu lainnya adalah amandemen UUD 1945.

⁶⁶ Wawancara penulis dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT dan Front Kota, pada tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

⁶⁷ Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMI dari BEM Universitas Tarumanagara, Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, dan Jumat, 02 April 2010, di Jakarta.

Sebenarnya di DPR tersedia banyak peluang bagi Abdurrahman Wahid untuk melakukan konsensus, sehingga dapat terhindar dari konflik berkepanjangan dengan para politisi partai politik. Peluang yang dimaksud antara lain: (1) saat pemerintah memberikan keterangan terhadap interpelasi 332 anggota DPR atas pencopotan Laksamana Sukardi dan Muhammad Jusuf Kalla (Juli 2000); (2) saat *reshuffle* kabinet pasca Sidang Tahunan MPR 2000; (3) saat memberikan keterangan terhadap Memorandum Pertama (Maret 2001) dan Memorandum Kedua (Mei 2001). Namun rasa percaya diri Abdurrahman Wahid yang sangat tinggi sehingga membuatnya tidak pernah ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu. Sebaliknya, justru cenderung menjadikan DPR sebagai lawan tandangnya dan selalu mengklaim dirinya lebih memiliki posisi konstitusional ketimbang parlemen.

Kecenderungan Presiden Abdurrahmad Wahid mengabaikan DPR lebih mencolok lagi dalam kasus pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Sesuai Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kapolri harus ada persetujuan DPR. Bahkan mekanisme baru yang dihasilkan melalui Sidang Tahunan MPR 2000 ternyata diabaikan oleh Presiden Abdurrahmad Wahid. Hal itu tampak pada kebijakannya memberhentikan Jenderal Rusdiharjo dan mengangkat Jenderal Surojo Bimantoro, lalu kemudian menonaktifkan kembali Jenderal Surojo Bimantoro dan mengangkat Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri. Padahal jabatan Wakapolri sudah dihapus berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri.⁶⁸ Tentang kronologis kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung menjelaskan secara panjang lebar dengan mengatakan:

“Setelah Abdurrahman Wahid terpilih, kemudian Abdurrahman Wahid yang dengan kepemimpinannya boleh dikatakan kontroversial kepemimpinannya, sering kali menimbulkan konflik, menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak kondusif di dalam politik itu muncul dengan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Misalnya saja pemunculannya pertama di DPR juga sudah mengeluarkan kata-kata, ” DPR seperti taman kanak-kanak”, sehingga orang-orang DPR juga marah, dan beberapa *statement-statement* dia memperuncing suasana dan kemudian puncak dari pada konflik-konflik itu berawal dari sikap Abdurrahman Wahid memberhentikan dua anggota

⁶⁸ Istilah “pemangku sementara jabatan Kapolri” dalam pelantikan Chaeruddin tidak dikenal dalam struktur organisasi kepolisian. Tentang pengangkatan Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Wakapolri lihat juga Syamsuddin Harris, *Ibid.*, hal.118.

kabinet yang notabnya berasal dari Golkar dan PDIP, dari Golkar itu Jusuf Kalla, dari PDIP itu Laksamana Sukardi. Karena dia memberhentikan tanpa alasan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa diterima dimana dia menuduh kedua orang itu melakukan tindakan korupsi bahkan terhadap Jusuf Kalla, Abdurrahman Wahid pernah bertemu dengan saya secara khusus dan dia mengajukan bukti-bukti keterlibatan Jusuf Kalla dalam tindak pidana korupsi, tapi saya waktu itu tidak mengubrislah karena saya tahu itu ketidaksukaan dia. Jadi akhirnya terjadi konflik antara Abdurrahman Wahid dengan DPR, ya DPR didominasi oleh dua kan? PDI-P dan Golkar. PDIP itu kursinya 153 kursi, Golkar kursinya 120, dengan total 273 kursi. Sedangkan anggota DPR waktu itu 500, sehingga separuh lebih, dipicu lagi *Buloggate* sehingga akhirnya DPR membentuk Panitia Khusus, Pansus Hak Angket, Pansus Hak Angket itulah awalnya dari kejatuhan Abdurrahman Wahid dimana pansus Hak Angket itu yang sangat keras melakukan penyelidikan terhadap Abdurrahman Wahid dan kemudian hasil dari penyelidikan Pansus Angket itulah DPR mengeluarkan memorandum-memorandum, memorandum pertama dan kemudian sampai memorandum kedua. Karena Abdurrahman Wahid mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat secara politik dari DPR melalui Pansus akhirnya Abdurrahman Wahid mengambil langkah politik yang justru sangat fatal dan itulah yang menjadi awal jatuhnya dia, dengan mengeluarkan Dekrit atau Maklumat Presiden dimana Dekrit Presiden itu membekukan DPR dan membekukan juga Partai Golkar. Nah ini merupakan tindakan Abdurrahman Wahid yang sangat fatal, karena dia membekukan lembaga tertinggi Negara, MPR waktu itu juga membekukan partai politik. Terhadap tindakan Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit atau Maklumat itulah kemudian saya sebagai Ketua DPR mengambil tindakan langkah-langkah, Dekritnya itu dikeluarkan pada malam hari pada jam 01.10 Wib langsung pada malam itu juga saya sebagai Ketua DPR langsung mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah untuk meminta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum terhadap tindakan Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit atau Maklumat. Dimana dalam surat itu sekaligus juga selaku Ketua DPR bahwa tindakan Abdurrahman Wahid itu bertentangan dengan konstitusi namun untuk mendapatkan kepastian hukum maka kami minta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum. Surat itu saya kirim juga tengah malam sekitar jam 1an lebih. *Alhamdulillah*, Mahkamah Agung juga segera merespon dan saya juga berkomunikasi dengan pimpinan Mahkamah Agung dalam hal ini Pak Bagir Manan. Pak Bagir Manan dan anggota Hakim Agung lainnya juga segera merespon dan segera mereka juga melakukan pertemuan rapat dini hari. Setelah hasil dari pertemuan mereka, *Alhamdulillah* pagi hari kami sudah tahu yang intinya bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan Abdurrahman Wahid itu bertentangan dengan hukum, tidak ada kewenangan Abdurrahman Wahid untuk membekukan, membubarkan organisasi politik karena itu bukan kewenangan dari Presiden apa lagi misalnya membekukan DPR. Dan atas dasar itulah MPR yang memang diundang bersidang untuk Sidang Istimewa dalam rangka menindak lanjuti memorandum DPR mendapatkan satu amunisi yang sangat efektif, yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa Abdurrahman Wahid itu melanggar

konstitusi karena dia membekukan DPR dan Partai Golkar dan itu diperkuat dengan adanya fatwa dari Mahkamah Agung. Atas dasar itulah kemudian MPR mencabut mandat dari Abdurrahman Wahid. Jadi itulah kronologis dari pada terjadinya proses pencabutan mandat dari Abdurrahman Wahid walaupun pada hari-hari berikutnya Abdurrahman Wahid mencoba melakukan perlawanan tapi MPR bisa mencabut dan MPR juga segera melakukan pemilihan Presiden karena Bu Megawati Wakil Presiden dan otomatis Bu Megawati lah menjadi Presiden dan setelah itu diproses untuk pemilihan Wakil Presiden dan akhirnya terpilih Pak Hamzah Haz. Jadi itulah kronologis elit partai politik kenapa menjatuhkan Abdurrahman Wahid dan akhirnya Bu Megawati jadi Presiden.”⁶⁹

Kejatuhan Abdurrahman Wahid karena kesalahan Abdurrahman Wahid sendiri juga dibenarkan oleh Bachtiar Chamsjah elit politik PPP dan Mantan Ketua Pansus *Bulogate* masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan :

“Iya, itu karena kesalahan Gus Dur membuat dekrit membubarkan MPR/DPR, yah tentu semua anggota DPR/MPR marahlah, apa yang terjadi ini? Yah, masa kita dibubarkan, ini kan melanggar Undang-Undang, yah kita rapat lah terus. Jadi membuat situasi pansus matang, semuanya ini, kalau dia arif, semuanya biarpun dia matang, gak jadi masak itu, tapi di tambah dengan dekrit yah, jatuhlah dia”.⁷⁰

Dari penjelasan Akbar Tanjung dan Bachtiar Chamsjah tersebut dapat ditegaskan bahwa kejatuhan Abdurrahman Wahid adalah hasil akumulasi dari kekecewaan elit politik terhadap kebijakan Abdurrahman Wahid dan kesiapan Megawati Soekarnoputri untuk menggantinya. Abdurrahman Wahid dinaikkan ke dan diturunkan dari kursi kepresidenan oleh elit politik yang menaikkan Megawati Soekarnoputri.

6.2.3. Dukungan dan Penolakan Atas Dasar Ideologi

Proses naiknya dan kejatuhan Abdurrahman Wahid yang sangat dominan diperankan oleh elit politik terutama elit partai politik yang menjadi bagian dari Poros Tengah merupakan dasar dari polarisasi gerakan mahasiswa. Poros Tengah bukan saja memiliki kepentingan politik, namun juga kepentingan ideologis. Adanya unsur ideologis dalam polarisasi gerakan mahasiswa dapat dilihat dari kecenderungan kelompok-kelompok yang dinilai kiri dekat kepada Abdurrahman Wahid, seperti PRD dan FORKOT. Sebaliknya, kecenderungan gerakan mahasiswa yang dianggap kanan mengambil posisi penentang Abdurrahman

⁶⁹ Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

⁷⁰ Wawancara dengan Bachtiar Chamsjah Rabu, 21 April 2010 di Jakarta.

Wahid. Tentang adanya polarisasi gerakan mahasiswa berdasar ideologi, Andre Rosiade, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dan Aktivist BEMSI mengatakan:

”Secara tidak langsung, memang ada unsur seperti itu, ada pertarungan ideologi, karena kita lihat orang yang ada di kubu Abdurrahman Wahid itu adalah FORKOT, yang kita tahu gerakan-gerakan itu ada Bang Adian, Masinton. Memang secara ideologi, berbeda dengan kita. Jadi mungkin saja pertarungan ideologi itu ada, karena di polarisasi itu kita bisa lihat PRD dan FORKOT ada di belakang Abdurrahman Wahid. Teman-teman yang cenderung kanan ada di gerakan anti Abdurrahman Wahid. Jadi saya anggap ada itu, karena memang fakta di lapangan seperti itu, yang oposisi saya di kampus juga adalah teman-teman secara ideologi berbeda dengan saya. Awalnya itu bahwa kita anggap Abdurrahman Wahid sudah tidak relevan lagi memimpin Indonesia. Kebijakan-kebijakannya yang bicaranya dulu mendukung demokrasi tapi menentang demokrasi, tidak mendukung rakyat, sehingga kita tergerak untuk menggantikan rezim. Soal ideologi itu datangnya belakangan, kita lihat kebijakannya yang mendukung Israel, yang begitu dekat dengan kekuatan yang menentang Islam, lalu polarisasi gerakan di lapangan itu jelas bahwa teman-teman pendukung Abdurrahman Wahid, jelas ideologinya berbeda dengan penentang Abdurrahman Wahid.”⁷¹

Pengakuan Andre Rosiade tentang adanya polarisasi gerakan mahasiswa berdasar ideologi juga diakui oleh Arif Rahman, Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Aktivist dan Koordinator BEMI pendukung Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Kalau masalah dukungan mendukung Gus Dur sebenarnya lebih mengarah ke pemahaman ideologi yang sama tentang demokrasi. Jadi Gus Dur dengan ide pluralismenya, demokrasi, otonomi daerah itulah yang membuat satu persepsi dengan kita.”⁷²

Polarisasi gerakan mahasiswa seperti yang ditunjukkan oleh BEMSI yang penentang Abdurrahman Wahid dan yang BEMI yang pendukung Abdurrahman Wahid disebabkan adanya faktor pengaruh kepentingan politik elit politik yang ingin menjatuhkan Abdurrahman Wahid dan elit politik yang ingin mempertahankan Abdurrahman Wahid dalam gerakan mahasiswa. Juga oleh kepentingan politik yang sedang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok gerakan

⁷¹ Wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, pada tanggal 25 Maret 2010 Jam 17.00Wib di Jakarta.

⁷² Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivist dan Koordinator BEMI, Sabtu, 28 November 2009, dan Jumat, 02 April 2010, di Jakarta.

mahasiswa. BEMI, misalnya, mendukung dan berusaha mempertahankan Abdurrahman Wahid karena Abdurrahman Wahid dapat bersikap tegas terhadap tuntutan BEMI, seperti tuntutan pembubaran Golkar dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Arif Rahman, Aktivistis dan Koordinator BEMI mengatakan:

Ya jelas kalau bicara kepentingan karena korelasi kita ke NU jelas kita punya kepentingan politik, tapi kepentingan politik itu ada dasarnya bahwa dasarnya Abdurrahman Wahid ingin membangun demokrasi di Indonesia dengan mencabut Dwifungsi ABRI dan lain-lain, Abdurrahman Wahid berani membubarkan Golkar itu yang melandasi bahwa Abdurrahman Wahid tokoh yang kita harus *support* dan jaga.⁷³

Selain itu juga oleh faktor kepentingan ideologi yang dianut oleh kelompok-kelompok gerakan mahasiswa. Konflik antara BEMI yang pendukung Abdurrahman Wahid dan BEMSI yang penentang Abdurrahman Wahid disebabkan oleh ideologi yang dianut partai politik yang berada di belakangnya masing-masing. Ideologi PKB yang berada di belakang ideologi BEMI dan ideologi PKS yang berada di belakang ideologi BEMSI bertarung dan saling berebut pengaruh. Hal itu diakui oleh Arif Rahman, Aktivistis dan Koordinator BEMI mengatakan:

”Saya sepakat bahwa memang isu-isu yang digulirkan pada saat itu bahwa Abdurrahman Wahid antek-antek Yahudi, antek-antek Israel dan memang ada pemahaman yang berbeda tentang perspektif pluralisme di Indonesia dengan kita bahwa mereka menganggap dulu ya memang terkenal Partai Keadilan Sejahtera dengan jargon kanannya karena memang dulu yang melawan kita jelas itu adalah kelompok kanan yang dibina seperti FPI, Pam Swakarsa, karena bagaimanapun Pam Swakarsa itu bagian dari kepentingan politik untuk menghantam Abdurrahman Wahid pada saat itu yang dilakukan beberapa petinggi militer yang ada di Indonesia. Nah inilah lawan kami yang memang tidak setuju Abdurrahman Wahid memimpin dengan ide pluralisme, karena Abdurrahman Wahid bicara agama Konghucu, membuka masalah pembelaan terhadap tahanan politik yang berhubungan dengan G30S/PKI itu. Abdurrahman Wahid yang buka kita dalam perspektif bahwa mereka bicara komunisme, bahwa memang komunisme tidak berhak hidup di Indonesia, tapi yang jadi masalah pada saat itu kita melihat bahwa banyak narapidana yang direkayasa supaya mereka tidak bergerak, karena memang Orde Baru saat itu tidak menginginkan ada percikan-percikan politik. Jadi saya anggap yang dilakukan Abdurrahman Wahid adalah kepentingan-kepentingan yang memang sensitif, bukan korupsi. Saya pikir itu hanya isu yang dibuat, tapi sebenarnya ada ketakutan dari beberapa kelompok elit-elit di Indonesia kalau Gus Dur memimpin demokrasi ini bisa berjalan dengan

⁷³ Wawancara dengan Arif Rahman Aktivistis dan Koordinator BEMI, pada tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

baik karena bagaimanapun kalau demokrasi bisa jalan berarti korupsi, kolusi dan nepotisme harus dihilangkan ada ketakutan itu dari kelompok tertentu yang anti Abdurrahman Wahid.”⁷⁴

Perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ideologis yang ada dalam masing-masing gerakan mahasiswa tidak hanya menyebabkan terjadinya konflik non-fisik, tetapi juga memicu terjadinya konflik fisik antara gerakan mahasiswa yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid. Perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ideologis antara BEMI yang didukung oleh PMII dan PKB dengan BEMSI yang didukung oleh KAMMI dan PKS menyebabkan kedua belah pihak berkonflik secara fisik. Arif Rahman, Aktivist BEMI ypendukung Abdurrahman Wahid membenarkan adanya konflik fisik antar BEMI dan BEMSI yang didukung kelompok-kelompok penentang Abdurrahman Wahid. Arif Rahman, Aktivist dan Koordinator BEMI, mengatakan:

”Pernah fisik di Atma Jaya. Pada saat kita aksi, kalau gak salah tahun 2000 itu aksi mau ke Istana atau DPR? Teman-teman dari KAMMI itu aksi ke Istana, pulang dari Istana kita ketemu di lapangan kita bentrok secara fisik, pukul-pukulan, bahkan saat itu Atma Jaya diserbu juga oleh beberapa kelompok-kelompok Islam Pam Swakarsa dan Front Pembela Islam.”⁷⁵

Konflik fisik ini tidak hanya terjadi diantara BEMI dan BEMSI tapi juga melibatkan elemen-elemen masyarakat pendukung dan penentang Abdurrahman Wahid. Andre Rosiade, Aktivist BEMSI mengatakan :

“Gus Dur pernah bikin acara di Hotel Indonesia terjadi kerusuhan, jadi teman-teman BEM SI lagi di bundaran HI tiba-tiba diserbu oleh teman-teman pro Gus Dur mereka keluar dari itu kebetulan saya telat datangnya jadi teman teman diserbu, tiba tiba kan waktu kita digebukin, teman teman kabur semua ke UI. Tiba-tiba teman-teman yang nyerbu keluar itu di pukulin sama massa yang tidak kita ketahui bersama, sehingga ada yang terluka-luka, jadi kedua belah pihak saling menuding, kebetulan saya datang terakhir saya tidak mengetahui kejadian itu, jadi saya undang kedua belah pihak BEM dan teman teman, saya datengin Bang Adian, saya ajak ketemu di jalan Tendean tapi Bang Adian tidak mau, tapi yang lain hadir waktu itu semua hadir di Trisakti waktu itu, kita coba jembatani lah ya, boleh berbeda tapi silaturahmi tetap terjaga. Saya masih ingat waktu itu waktu 12 Maret 2001 waktu teman teman saya lewat dan kita habis pulang

⁷⁴ Wawancara dengan Arif Rahman Aktivist dan Koordinator BEMI pada tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

⁷⁵ Wawancara dengan Arif Rahman Aktivist dan Koordinator BEMI, pada tanggal 28 November 2009 di Jakarta.

demonstrasi di Istana kita kan konvoi ke DPR rencana ingin menduduki DPR malam itu, tiba tiba di Atma Jaya kita di ganggu, diserbu oleh orang Atma Jaya tapi karena massa kita lebih banyak jadi saya udah jalan terus, jadi massa kita itu begitu banyak mungkin dibantu oleh kubu-kubu pro Islam karena bukan mahasiswa saja waktu itu banyak juga semacam gerakan-gerakan lain menyerbu ke Atma Jaya.”⁷⁶

Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid bersama dengan massa elit partai politik yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid semuanya termasuk ke dalam gerakan politik, karena bertujuan ingin mempengaruhi atau mengubah kebijakan atau kondisi politik yang ada sesuai dengan keinginannya. Aktivitas gerakan berupa aksi-aksi unjuk rasa untuk mendukung atau menolak Abdurrahman Wahid yang semuanya ditujukan untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh kerelaan berkorban sampai mati, dilakukan secara kompak, memiliki fanatisme, antusiaisme, harapan berapi-api, kebencian, intoleransi dan kesetiaan tunggal merupakan ciri gerakan massa seperti dirumuskan oleh Eric Hoffer.⁷⁷

6.2.4. Dukungan dan Penolakan Atas Dasar Kepentingan Politik

Baik B.J. Habibie maupun Abdurrahman Wahid berhasil mencapai puncak kekuasaan atas kompromi antara elit politik yang mendukungnya dan elit politik yang menolaknya. Sebaliknya, kejatuhan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh ketidakmampuan para elit politik yang mendukungnya melakukan kompromi politik dengan para elit politik yang menolaknya. Konflik politik antara para elit politik pendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan para elit politik yang menolak B.J. Habibie dan dan Abdurrahman Wahid yang gagal mencapai konsensus politik menyebabkan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid jatuh dari kekuasaannya.

Dalam konteks gerakan mahasiswa kejatuhan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh dua hal, yaitu: (2) hampir seluruh elit partai politik pendukung Abdurrahman Wahid, seperti Amin Rais (PAN), Akbar Tanjung (Partai Golkar)

⁷⁶ Wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, pada tanggal 25 Maret 2010 Jam 17.00 Wib di Jakarta.

⁷⁷ Menurut Hoffer Semua gerakan massa, betapa pun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, terdiri atas manusia-manusia yang kecewa dan tidak puas atau frustrasi.

Nurmahmudi Ismail (PKS) dan Bachtiar Chamsjah (PPP) yang memiliki akses terhadap kelompok-kelompok gerakan mahasiswa kembali menarik dukungannya; (2) baik elit partai politik eks-pendukung Abdurrahman Wahid maupun elit partai politik pendukung Megawati Soekarnoputri yang memiliki akses terhadap kelompok-kelompok gerakan mahasiswa semuanya mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Dengan lain perkataan bahwa kejatuhan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh ketidakmampuannya mempertahankan kekuasaannya dan kesiapan Megawati Soekarnoputri mengambil alih kekuasaan dari tangan Abdurrahman Wahid. Tentang adanya kepentingan elit yang masuk dalam gerakan mahasiswa, Taufik Riyadi, aktivis BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, mengatakan:

”Jadi memang, pada saat itu tidak terhindarkan. Jadi memang, saya terus terang aja yah, saya baru mengevaluasi beberapa tahun kemudian, memang akhirnya gerakan yang di bangun ini mulai masuklah muatan-muatan politiknya. Berkesinambunganlah, dan itu tidak terelakan. Terus terang, kontak-kontak politik itu ada dengan teman-teman yang di DPR, jadi seingat saya dulu ada kaukus politik yang ada Kwik Kian Gie, beberapa fraksilah, ada Ade Komaruddin, Kaukus 11 November kalau gak salah. Itu awal mulanya ada kontak itu. Makanya kan ada kemudian proses Pansus *Buloggate*, yang dipimpin mantan Mensos Bachtiar Chamsjah pada saat itu. Nah, gerakan ini juga terbangun ada gerakan politik di DPR-nya, sebenarnya hampir sama dengan century, cuma suasana pada saat itu sangat kondusif. Jadi pada saat itu, pemerintahan juga tidak menghandle fraksi-fraksi yang ada di DPR sedemikian rupa, jadi agak sangat percaya diri pada saat itu Abdurrahman Wahid, PDIP masih setengah-setengah pada saat itu. Kelompok-kelompok seperti Kwik Kian Gie, ada PAN, ada PPP, terus ada kontaklah, secara pribadi sih nggak, secara organisasi diundang, misalnya pada pertemuan dan sebagainya, dan itu juga dilakukan secara terbuka, beberapa kali untuk menyamakan, gerakan ini juga kan butuh dukungan politik gitu loh, Gak mungkin kan kita berdiri sendiri. Dan pada saat itu juga Pak Amien Rais sebagai Ketua MPR pada saat itu, jadi jelas kalau dibilang ada relasi antara mahasiswa dengan gerakan politik di DPR, itu jelas, dan kita saling memberikan informasi dan terjadilah komunikasi, walaupun ada beberapa dari awal beberapa dari partai itu meminta teman-teman mahasiswa untuk minta agenda penjatuhan Abdurrahman Wahid. Tapi pada saat itu saya tolak karena menurut saya tidak serta-merta harus selalu kita menjatuhkan, karena kita berbicara masalah *cost* juga pada waktu itu, dan ini kan sudah terpilih secara demokratis menurut kita, kalau memang nanti pada prosesnya itu ternyata *Buloggate* terbukti, oke, gitu loh. Akhirnya kita minta gini aja, sekarang Pansus jalan aja, buktikan gitu loh, benar gak? Bahwasanya Abdurrahman Wahid terindikasi, jadi pas gitu loh, proses hukum nya ada, korelasinya pas disitu. Itu sebenarnya kita minta pada waktu itu, dan akhirnya memang proses itu berjalan, dan Pansus sudah melihat, dan

Universitas Indonesia

itu masyarakat luas sudah melihat hal itu, bahwasanya ada indikasi KKN pada saat itu.⁷⁸

Kejatuhan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid disebabkan oleh toleransi dan reaksinya terhadap implementasi keempat unsur demokrasi yang dirumuskan oleh Juan J. Linz dan Alfred Stepan, yaitu: (1) kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang; (2) persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; (3) dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi; (4) hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka.⁷⁹

Kejatuhan B.J. Habibie disebabkan oleh toleransinya terhadap penggunaan kebebasan hukum oleh kelompok-kelompok politik penentang integrasi, penentang kekerasan dan penentang Orde Baru dalam merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik yang diperjuangkannya melalui kebebasan berserikat, berbicara dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya. Abdurrahman Wahid jatuh akibat sikapnya yang mendukung alternatif-alternatif politik dari kelompok-kelompok politik penentang diskriminasi, penentang kekerasan dan penentang Orde Baru yang diperjuangkan berdasarkan kebebasan hukum, berserikat dan berbicara. Kepada B.J. Habibie kelompok-kelompok politik penentang integrasi dan penentang kekerasan yang menuntut referendum bagi Timor-Timor, pengadilan HAM bagi Soeharto, dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Sedangkan kepada Abdurrahman Wahid kelompok-kelompok politik yang mengusung pluralisme, penentang diskriminasi, penentang kekerasan dan penentang Orde Baru menuntut persamaan dan keadilan politik, seperti pembebasan Tapol/Napol eks-komunis, mendukung hubungan Israel, pergantian Panglima TNI dari TNI AD ke TNI AL.

⁷⁸ Wawancara penulsi dengan Taufik Riyadi, aktivis BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, di Jakarta pada tanggal 01 April 2010.

⁷⁹ Juan Linz dan Alfred Stepan, *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions and Consolidation*, dalam Juan J. Linz (et al.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 26-27.

Hak untuk berpartisipasi bagi semua anggota masyarakat politik berdasarkan pilihan politiknya yang mendorong meningkatnya partisipasi politik dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi yang menuntut mundur B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid akibat kebijakan-kebijakan politiknya merupakan faktor lain yang membuat keduanya jatuh. Sikap B.J. Habibie yang bersedia memenuhi tuntutan kelompok-kelompok politik penentang integrasi dan penentang kekerasan, seperti kebijakan referendum bagi Timor-Timur, dan Abdurrahman Wahid yang bersedia memenuhi tuntutan kelompok-kelompok politik yang mengusung pluralisme, penentang diskriminasi, penentang kekerasan dan penentang Orde Baru, seperti membebaskan Tapol/Napol eks-komunis, bersedia mendukung hubungan dengan Israel, mengganti Panglima TNI dari TNI AD ke TNI AL.

Reformasi yang mendorong dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi bukan saja membuat B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak dapat mencegah elemen-elemen Orde Baru memasuki pemerintahannya, tapi juga menjadi sasaran ketidakpuasan baru bagi para pendukung reformasi total. Bahkan situasi politik segera berkembang lain ketika ketidakpuasan para pendukung reformasi total justru ditanggapi oleh B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan menentang demokrasi, sehingga posisinya berubah menjadi sumber ketidakpuasan baru. Laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak dan Abdurrahman Wahid jatuh akibat para elit politik terutama elit partai politik yang terlibat dalam persaingan politik yang bebas dan anti kekerasan tidak lagi mengakui keabsahan periodik pemerintahannya. B.J. Habibie yang merespon tuntutan pengunduran dirinya dengan mobilisasi Pam Swakarsa dan kelompok Islam garis keras, dan Abdurrahman Wahid yang merespon tuntutan pengunduran dirinya dengan mobilisasi pendukung PKB dan massa NU dan BEM I yang kemudian dihadapi oleh PKS, KAMMI dan BEMSI hanya memberi legitimasi bagi para elit politik anti B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid untuk segera mencabut keabsahan periodik pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Dari kasus ditolaknya laporan pertanggung jawaban B.J.Habibie dan kejatuhan Abdurrahman Wahid dapat ditegaskan kembali bahwa demokrasi

merupakan mekanisme politik yang tidak hanya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan politik, tetapi juga sistem yang memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi setiap orang yang ingin menggunakan kebebasannya untuk berbicara dan berserikat, serta mengusulkan atau menolak seseorang untuk suatu jabatan politik (liberalisasi politik). Hal itu sejalan dengan pandangan Schumpeter tentang demokrasi yang disebutnya sebagai “teori lain mengenai demokrasi”. Menurut Schumpeter “teori lain mengenai demokrasi” adalah suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.⁸⁰

Dalam upaya menjatuhkan dan mendukung Abdurahman Wahid para elit partai politik melakukan konsolidasi politik. Konsolidasi politik yang dilakukan oleh para elit partai politik baik penentang Abdurahman Wahid maupun yang mendukung Abdurahman Wahid untuk mengajak dan merangkul para aktivis mahasiswa yang memiliki tujuan politik yang sama. Oleh sebab itu konsolidasi politik untuk menjatuhkan dan atau mendukung Abdurahman Wahid umumnya dilakukan melalui kontak-kontak politik antara para elit partai politik dan para aktivis mahasiswa. Cara ini dianggap efektif karena selain mempermudah kedua belah pihak untuk menyusun dan menghitung kekuatan, juga untuk membantu memperkuat dan mempertajam tujuan dari konsolidasi politik itu. Tujuan konsolidasi politik bagi penentang Abdurahman Wahid adalah untuk memperkuat sikap dan keyakinan dalam menjatuhkan Abdurahman Wahid. Sebaliknya, tujuan konsolidasi politik bagi yang pendukung Abdurahman Wahid adalah untuk mempertahankan Abdurahman Wahid. Menurut Gabriel Almond kontak-kontak politik langsung dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan akan memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan keyakinan politik seseorang.⁸¹

Dari kasus ditolaknyanya laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie dan kejatuhan Abdurrahman Wahid, demokrasi menurut Huntington, berjalan dengan

⁸⁰ David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 5.

⁸¹ Gabriel Almond dalam Mas'ood dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1982, hal. 35-37.

dengan cara pergantian (*replacement*) dimana kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi, dan rejim otoriter tumbang atau digulingkan; serta dengan cara *transplacement* dimana proses demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Menurut Maswadi Rauf, demokratisasi adalah suatu proses tanpa akhir karena negara demokratis tidak akan pernah dihasilkan sekali jadi, perlu proses yang panjang.

